



**UNIVERSITAS INDONESIA**



**BOGOR PADA MASA BERSIAP 1945–1946**

**SKRIPSI**

**diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Humaniora**

**RIANI ANGGRAENI  
NPM 0704040394**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI SEJARAH  
DEPOK  
JULI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 21 Juli 2010



Riani Anggraeni

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Riani Anggraeni**

**NPM : 0704040394**

**Tandatangan :** 

**Tanggal : 21 Juli 2010**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh:

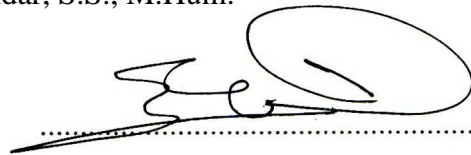
Nama : Riani Anggraeni  
 NPM : 0704040394  
 Program Studi : Ilmu Sejarah  
 Judul : Bogor pada Masa Bersiap 1945–1946

telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada program studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji : Iman Hilman, M.Hum.

Pembimbing : Dr. Mohammad Iskandar, S.S., M.Hum.



Pembaca/Penguji : Abdurrakhman, M.Hum.



Ditetapkan di : Depok  
 Tanggal : 21 Juli 2010

oleh


  
 Dekan  
 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
 Universitas Indonesia  
  
 Dr. Bambang Wibawarta  
 NIP. 19651023 199003 1 002

## KATA PENGANTAR

Karya ini merupakan wujud akhir pertanggungjawaban penulis selama menempuh pendidikan tinggi pada program studi Ilmu Sejarah FIB UI sejak 2004. Pengalaman yang penulis peroleh dalam rangka penyusunan tugas akhir ini sangat bermanfaat dan berharga, tidak hanya bagaimana cara menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan, namun terutama adalah penulis belajar bagaimana memanfaatkan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya supaya siap untuk menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis mengambil suatu periode singkat pada awal mula berjalannya Revolusi Nasional Indonesia yang disebut dengan Masa Bersiap dengan lokasi di Kabupaten dan Kota Bogor sebagai topik karya ini. Di dalam empat bab, penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana Masa Bersiap sebagai fenomena historis terjadi di wilayah Bogor yang ditandai dari berbagai peristiwa yang mengarah pada pergolakan sosial. Penulis menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa karya ini masih memiliki kekurangan di sana-sini, namun penulis berharap karya ini dapat menjadi batu loncatan bagi penulis untuk berkarya lebih baik. Penulis juga berharap karya ini dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak lain yang memiliki minat dan keingintahuan yang sejalan dengan topik yang diambil.

Tentu saja penulisan karya ini mustahil akan selesai jika penulis tidak mendapatkan bantuan dan dukungan dari:

1. Allah SWT atas berkah dan *ridla*-Nya dengan begitu banyak waktu yang diberikan sebagai kesempatan bagi penulis untuk lebih giat dan lebih baik dalam menyusun karya ini. *Subhanallah walhamdulillah*.
2. Keluarga penulis: Mutti, Vati dan Andi, atas seluruh dukungan materi dan spiritual, juga Oma Kip, supaya penulis dapat meraih kehidupan yang lebih baik setelah selesai menempuh pendidikan sarjana.
3. Bapak Dr. Mohammad Iskandar, atas kerelaan memberi masukan tema kepada penulis dan terutama kesabaran beliau selama menjadi pembimbing bagi penulis sejak awal penyusunan karya ini hingga akhir.

4. Bapak Iman Hilman, M.Hum dan bapak Abdurrahman, M.Hum, selaku ketua sidang dan pembaca, yang dengan sangat kritis telah mengoreksi dan memberi masukan-masukan konstruktif untuk revisi karya ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Sejarah yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan, khususnya kepada bapak Prof. Dr. Susanto Zuhdi yang telah berkenan mengizinkan penulis menggunakan skripsinya sebagai salah satu sumber.
6. Seluruh pengurus Museum Perjuangan Bogor, terutama kepada bapak Mardjono sebagai ketua yang berkenan membantu penyusunan karya ini dengan mengizinkan penulis untuk mengakses koleksi surat kabar dan selebaran-selebaran yang terkait dengan topik. Begitu juga bapak Edwin atas sambutan dan obrolan beliau yang bersahabat, dan bapak Wawan yang telah membantu penulis dalam menelusuri koleksi Museum termasuk pinjaman buku *Sejarah Perjuangan Kabupaten Bogor* yang sangat penting bagi penulis sebagai salah satu sumber utama. Tidak terkecuali kepada Indra Bimantara yang berkenan menyediakan waktu dan tenaga untuk mengantarkan dan menemani penulis selama mencari sumber di Bogor.
7. Seluruh pengelola Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah membantu penulis untuk mendapatkan sumber-sumber yang relevan. Begitu juga dengan seluruh petugas lantai 8 dan 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah berkenan membantu penulis untuk mengakses surat-surat kabar yang berwujud koran maupun mikrofilm.
8. Angkatan 2004 kloter pertama (tahun 2008) hingga kloter terakhir (tahun ini) yang telah mewarnai hari-hari penulis selama menjadi mahasiswa, terutama kepada: Siti 'Eha' Julaeha, *kamerad* yang paling banyak memperhatikan, mendukung dan memahami penulis; Prima Rafika, S.Hum. dan Ari Kurniasari, S.Hum, atas diskusi yang menyangkut penulisan ini maupun obrolan ringan lainnya; Ivan Aulia Ahsan yang telah berkenan meminjamkan koleksi pustakanya kepada penulis; sesama kloter terakhir: Sulaiman, Sumarno, Martin Hidayat, Dien Anshara, Eli Emalia; teman-teman yang telah lulus (urutan tidak menunjukkan prioritas): Fikri, Sammy, Adit, Dimas, Gaby, Rara, Arief, Mulce, Myrna, Ningrum, Franto, Prisca, Sania,

Arie, Vini, Yudha, Wisnu, Yuniyah, dan teman-teman yang pernah menjalani kuliah bersama: Ajay, Bram, Dylan, Endang, Rian, Aya.

9. Agung Budiawan, atas dukungan personalnya terhadap penulis, yang telah begitu perhatian dan sangat memahami penulis lewat celoteh maupun keluhan kesah penulis selama menyusun karya ini dan hal-hal pribadi lainnya. Semoga karya ini menjadi bukti bahwa kesuksesan dapat diraih bersama-sama, walaupun terpisahkan oleh jarak.

Dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih setinggi-tingginya dan mohon maaf sebesar-besarnya jika penulis telah melakukan hal-hal yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun tidak.

Sebagai akhir kata, penulis mengutip suatu kalimat yang dituliskan oleh dr. Priguna Sidharta: *aku telah merangkai karangan bunga dari bunga-bunga milik orang lain, dan tiada setangkaipun, hanya tali yang mengikat bunga-bunga itu saja, adalah milikku.*

Jakarta, 19 Juli 2010

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riani Anggraeni  
NPM : 0704040394  
Program Studi : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Bogor pada Masa Bersiap 1945 – 1946

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Juli 2010

Yang menyatakan,



Riani Anggraeni

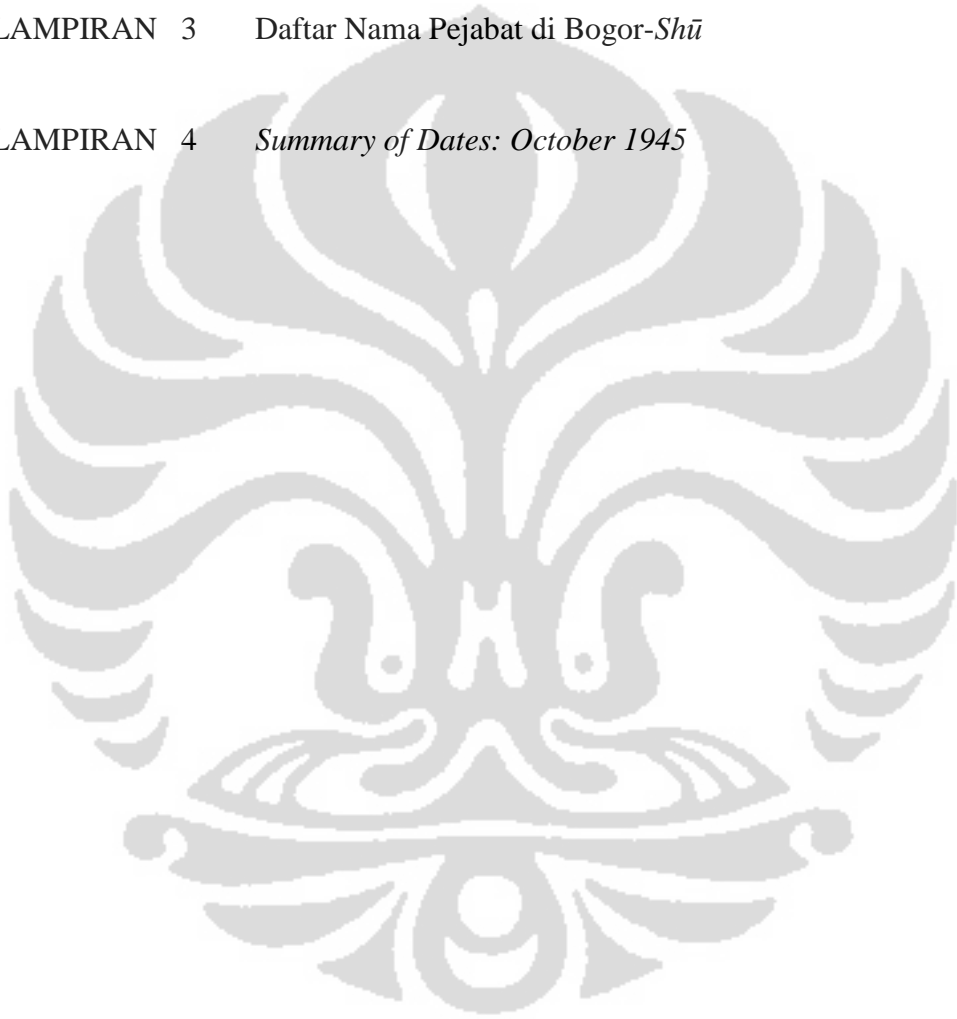


## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB 1    PENDAHULUAN	
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    PERUMUSAN MASALAH .....	9
1.3    RUANG LINGKUP MASALAH .....	10
1.4    TUJUAN PENELITIAN .....	10
1.5    METODE PENELITIAN .....	11
1.6    SUMBER SEJARAH .....	12
1.7    SISTEMATIKA PENULISAN .....	13
BAB 2    BOGOR SEBELUM PROKLAMASI	
2.1    BUITENZORG MENJELANG AKHIR MASA HINDIA BELANDA .....	14
2.2    SITUASI DAN KONDISI BOGOR-SHŪ HINGGA BERAKHIRNYA OKUPASI JEPANG .....	20
2.3    BERITA PROKLAMASI DI BOGOR .....	24
BAB 3    BOGOR SETELAH PROKLAMASI	
3.1    PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN RI DI BOGOR .....	26
3.2    KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DI BOGOR .....	29
3.3    KEGENTINGAN DI SEKITAR BOGOR .....	33
3.4    AKHIR MASA BERSIAP DI BOGOR .....	41
BAB 4    KESIMPULAN .....	44
DAFTAR PUSTAKA .....	47
LAMPIRAN .....	50

**DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 *Administratieve indeeling van de residentie BUITENZORG*
- LAMPIRAN 2 Peta Gerak Maju Pasukan Jepang di Jawa Barat
- LAMPIRAN 3 Daftar Nama Pejabat di Bogor-*Shū*
- LAMPIRAN 4 *Summary of Dates: October 1945*



## ABSTRAK

Nama : Riani Anggraeni  
Program Studi : Sejarah  
Judul : Bogor pada Masa Bersiap 1945–1946

Skripsi ini berusaha membahas tentang bagaimana Masa Bersiap sebagai fenomena historis berlangsung di wilayah Bogor, yaitu Kabupaten dan Kota Bogor. Secara garis besar, Masa Bersiap di Bogor terjadi karena kemampuan pemerintah Keresidenan Bogor saat itu belum memadai untuk mengendalikan dan mempertahankan ketertiban dan keamanan di wilayahnya sendiri. Gangguan keamanan tersebut diperkeruh oleh tindakan tentara Gurkha dan NICA yang hendak mengembalikan kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia dan aksi kudeta yang dilakukan oleh kelompok Direktorium. Setelah selesai mengatasi gangguan-gangguan internal dan memperoleh pengakuan dari Sekutu, Bogor telah mengakhiri Masa Bersiapnya untuk melanjutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kata kunci:

Revolusi Indonesia, Bersiap, Kabupaten Bogor, 1945-1946

## ABSTRACT

Name : Riani Anggraeni  
Study Program : History  
Title : Bogor at periode of Bersiap 1945–1946

The thesis is trying to explain how Bersiap as a historical phenomenon happened in Kabupaten and Kota Bogor. In general, Bersiap was happening in Bogor because the government of Residence Bogor at that time was unable to control and defend the 'rust en orde' at its own area. Many disturbances were caused by Gurkhas and NICA officers who wanted to raise the country of Netherlands-Indies again, also the coup d'état done by a group called Directory. After finished the disturbances and got Alliance's acknowledgement, the Residence of Bogor has ended its Bersiap to continue our struggle to defend the independence of Indonesia.

Keywords:

Indonesia Revolution, Bersiap, Bogor, 1945-1946

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penanda awal berdirinya sebuah negara baru yang bernama Republik Indonesia (RI) dalam suatu proses yang disebut sebagai Revolusi Nasional Indonesia<sup>1</sup> atau Perang Kemerdekaan.<sup>2</sup> Selain sebagai masa perjuangan, Revolusi Indonesia merupakan masa pergolakan yang ditandai oleh berbagai macam peristiwa yang menunjukkan adanya konflik sebagai wujud interaksi antara faktor-faktor internal maupun eksternal dari golongan-golongan politik yang secara ideologis berbeda pandangan, sikap, tindakan dan kepentingan.<sup>3</sup> Konflik sebagai urat nadi dari proses Revolusi Indonesia menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat Indonesia secara inheren mengandung benih faksionalisme dan perpecahan,<sup>4</sup> meskipun gagasan “Indonesia Merdeka” tetap direalisasikan sekaligus menjadi *raison d'être*<sup>5</sup> dan dambaan bersama bagi hampir seluruh lapisan masyarakat pada saat itu.<sup>6</sup> Akan tetapi, konflik tersebut tidak lantas muncul begitu saja. Hal-hal yang melatarbelakangi kemunculan Revolusi Indonesia dapat dilihat dan ditelusuri berdasarkan konflik yang timbul sejak sebelum dan sesudah masyarakat Hindia Timur secara sadar menyebut diri

---

<sup>1</sup> Konsep mengenai revolusi sendiri memiliki pengertian yang bervariasi, sehingga definisi tentang revolusi tidak dapat dirumuskan secara pasti. Menurut *International Encyclopedia of the Social Sciences*, secara umum revolusi diartikan sebagai suatu usaha untuk mengubah suatu sistem pemerintahan secara radikal, yang kadang melibatkan pelanggaran terhadap susunan konstitusional yang berlaku dan penggunaan kekerasan, di bidang ekonomi, budaya maupun sosial. Namun konsep revolusi tersebut berubah dari transformasi pemerintahan secara fundamental seperti Revolusi Perancis (revolusi klasik) ke pertentangan kelas menurut pengertian doktrin Marxis-Leninis dalam Revolusi Rusia (revolusi modern) yang kemudian mendominasi makna revolusi secara luas, seperti yang terjadi di Cina dan Kuba (hlm. 501-507). Revolusi Indonesia termasuk pada kategori *national revolution*, yaitu revolusi yang menghasilkan kemerdekaan nasional dan pembentukan bangsa serta kesatuan politik, yang dijiwai oleh semangat antikolonialisme. Lihat Suyatno, *Masyarakat Daerah dalam Revolusi: Aspek Revolusi Sosial dalam Revolusi Nasional*.

<sup>2</sup> Istilah ini muncul untuk menekankan konsep Revolusi Indonesia terutama pada perjuangan bersenjata (perjuangan fisik) terutama pada pertengahan 1946 dan akhir 1948, sekaligus menghindari pengertian umum revolusi yang (dianggap) telah didominasi oleh ‘aliran-aliran kiri’. Lihat A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 2: Diplomasi atau Bertempur* (Bandung: Penerbit ANGKASA, 1977), hlm. 513.

<sup>3</sup> Sartono Kartodirdjo, “Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektivisme Struktural”, *Prisma no. 8* (1981), hlm. 5.

<sup>4</sup> *Loc.cit.*

<sup>5</sup> Dorongan kuat untuk bertindak yang umumnya didasari atas pertimbangan emosional (Pr.).

<sup>6</sup> Hartojo D. Kadjat, “Mentalitas Revolusi di Indonesia”, t.p., 1994.

mereka sebagai bangsa Indonesia. Secara umum, Revolusi Indonesia lahir sebagai puncak dari konflik berkepanjangan antara pihak asing yang superior dan para pendukungnya, baik Eropa maupun Jepang, dengan pihak pribumi yang mayoritas inferior, selain dipengaruhi perkembangan global terutama pada abad XX yang pada dasarnya mendorong pertumbuhan nasionalisme Indonesia dan negara-negara Asia lainnya.

Pergolakan yang terjadi pada awal mula perjalanan Revolusi Indonesia merupakan suatu fenomena historis yang dinamakan Masa Bersiap (*Bersiap-tijd* atau *-periode*). Istilah ini lahir dari dari aba-aba ‘*siaaap!*’ yang sangat khas dan sering diserukan oleh para pemuda<sup>7</sup> untuk berkumpul dan berbaris, supaya siap untuk bertempur melawan Belanda yang ingin menjajah Indonesia lagi.<sup>8</sup> Akan tetapi, pengertian dan makna Masa Bersiap tidak hanya terbatas pada asal usul etimologisnya seperti yang telah disebutkan. Masa Bersiap harus ditafsirkan secara sosial-historis sebagai suatu proses perubahan yang revolusioner, di mana terjadi suatu gerakan sosial bersenjata yang ditujukan kepada penguasa kolonial yang hendak berkuasa kembali. Sifat revolusionernya yang disertai kekuatan bersenjata menunjukkan bahwa Masa Bersiap merupakan periode yang penuh dengan kekacauan dalam berbagai tindakan kekerasan terhadap pihak-pihak yang dicurigai mendukung penguasa kolonial, mulai dari penculikan, penjarahan (penggedoran), perampokan, pembunuhan bahkan pembantaian massal. Kekacauan-kekacauan tersebut relatif tidak dapat dikendalikan oleh Pemerintahan RI yang pada saat itu masih lemah, sehingga Masa Bersiap menjadi masa transisi yang kritis dan sangat menentukan.<sup>9</sup>

Selain itu, penyebaran berita Proklamasi ke daerah-daerah disampaikan dalam cara dan waktu yang beragam, sehingga berpengaruh pada makna dan pemaknaan masing-masing pihak. Ada yang menanggapinya secara suka cita dan langsung mendukung RI, ada pula yang menafsirkannya sebagai kemerdekaan un-

<sup>7</sup> Pemuda di dalam tatanan masyarakat tradisional (khususnya Jawa) merupakan suatu fase kehidupan seorang anak laki-laki yang telah melewati masa kanak-kanaknya sebagai perlintasan menuju masa dewasa, dengan rentang umur 15 sampai 25 tahun dan sudah akil balig namun masih bujangan.

<sup>8</sup> Adam Malik, *Mengabdi Republik jilid II: Angkatan 45* (Jakarta: Gunung Agung, 1978), hlm. 77.

<sup>9</sup> Mohammad Iskandar, “MASA BERSIAP DI KABUPATEN BOGOR (Bogor Sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI),” makalah pada Seminar Sehari tentang Kajian Lahirnya Bogor, Sindangbarang (Bogor: 11 Juni 2008), hlm. 1.

tuk bertindak sesuai dengan kehendak dan kepentingannya sendiri.<sup>10</sup> Bahkan beberapa di antaranya malah melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan garis perjuangan yang ditentukan Pemerintah Pusat. Tokoh-tokoh masyarakat ini memegang kendali di daerah-daerah kekuasaannya, bahkan langsung mengambil alih kekuasaan para pejabat lama yang dinilai sebagai bekas kaki tangan penjajah tanpa bertanya ataupun meminta pengarahan dari Pusat.<sup>11</sup> Para pejabat lama tersebut digantikan oleh para pemimpin alternatif berlatar belakang tradisional-religius ataupun sosial-komunis yang dianggap lebih dekat dengan rakyat sehingga lebih mampu ‘memperhatikan kehendak rakyat’.<sup>12</sup> Tindakan-tindakan yang juga dikenal dengan nama *aksi daulat* ini diikuti dengan pembentukan pemerintahan setempat yang kemudian melahirkan perubahan sosial secara spontan sebagai akibat yang tidak diperkirakan sebelumnya.<sup>13</sup>

Dinamika gerakan sosial ini digerakkan oleh pemuda dengan rentang usia antara 15 sampai 25 tahun yang sebagian besar pernah memiliki pengalaman dalam organisasi-organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh Jepang. Para pemuda ini memiliki latar belakang strata sosial masyarakat pribumi dan pendidikan yang bervariasi: dari rakyat jelata sampai kaum elit tradisional maupun agama, dari yang tidak memiliki riwayat pendidikan sampai yang pernah mengenyam pendidikan tinggi.<sup>14</sup> Keterlibatan aktif pemuda pada Masa Bersiap didorong oleh suatu kecurigaan yang mendekati paranoia akan kedatangan NICA, yang kemudian memudahkan pemakaian kekerasan untuk mempertahankan eksistensi mereka atas nama RI, yang tidak jarang diboncengi unsur-unsur kriminalitas seperti perampokan dan pembunuhan.<sup>15</sup> Penggunaan kekerasan ini menjadi pisau bermata dua: di satu sisi menjadi ‘modal’ yang berharga untuk perjuangan revolusioner, namun di sisi lain membahayakan bahkan mengancam eksistensi kehidupan komunitas itu sendiri karena tidak jarang para pemimpin kelompok-kelompok pemuda me-

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>11</sup> Mohammad Iskandar, *et.al.*, *Peranan Elit Agama pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 68.

<sup>12</sup> Anthony Reid, *Revolusi Nasional Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 104-105.

<sup>13</sup> Benedict R. O’G Anderson, *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance 1944–1946* (Ithaca dan London: Cornell University Press, 1972), hlm. 335.

<sup>14</sup> Dr. H.Th. Bussemaker, *Bersiap! Opstand in het paradijs: De Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945–1946* (Zutphen: Walburg Press, 2005), hlm. 14.

<sup>15</sup> Reid, *Op.Cit.*, hlm. 90.

manfaatkan kekerasan untuk menguasai situasi dan memobilisasi massa untuk kepentingan tertentu.<sup>16</sup>

Target kekerasan pemuda pada Masa Bersiap umumnya adalah kelompok-kelompok minoritas yaitu orang-orang Eropa (terutama Belanda dan Inggris), Indo, Cina, Ambon dan Manado. Orang Indo dan Ambon merupakan dua kelompok yang mengalami kerugian dan penderitaan paling banyak selama Masa Bersiap, karena merekalah yang paling aktif untuk memulihkan kembali kekuasaan Hindia Belanda dibandingkan orang Cina yang memilih untuk menyingkir.<sup>17</sup> Oleh karena penggunaan kekerasan ditujukan berdasarkan suku bangsanya, tidak jarang Masa Bersiap dianggap sebagai masa pembersihan etnis. Bahkan tidak sedikit orang Kristen menjadi korban seperti yang terjadi di Depok pada Oktober 1945, sehingga masa ini juga dikatakan sebagai masa pembersihan kultural.<sup>18</sup>

Timbulnya kekacauan-kekacauan tersebut bukan merupakan suatu hal yang begitu saja terjadi pada Masa Bersiap. Semangat antikolonial di kalangan rakyat pribumi merupakan sesuatu yang sudah lama terpendam sejak kekuasaan Belanda mencengkeram tanah Hindia dengan kuat dan ketat. Rakyat pribumi ditempatkan dalam struktur masyarakat kolonial yang begitu kaku dan dikotak-kotakkan secara jelas sehingga menimbulkan diskriminasi sosial, ekonomi maupun politik yang melahirkan ketidakpuasan sosial. Pemberontakan-pemberontakan pecah sebagai ledakan ketidakpuasan rakyat pribumi yang terorganisir oleh seorang tokoh kharismatik maupun sekelompok massa, yang kemudian dapat dengan mudah ditumpas oleh pemerintah kolonial. Tidak hanya di tingkat bawah, bahkan di tingkat elit pun pemerintah kolonial membatasi pergerakan-pergerakan kalangan cendekiawan yang lantang menyerukan nasionalisme Indonesia. Akumulasi penindasan seperti inilah yang menjadi bumerang bagi Belanda ketika invasi Jepang masuk secara sistematis dan pada saat yang sama kehilangan dukungan rakyat pribumi sehingga jatuhnya Hindia Belanda pada pertengahan tahun 1942 tidak dapat dihindari.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Kartodirdjo, *Loc.Cit.*, hlm. 9.

<sup>17</sup> Bussemaker, *Op.Cit.*, hlm. 11.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>19</sup> Sartono Kartodirdjo, *et.al.*, *Sejarah Nasional Indonesia jilid V* (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hlm. 95.



Pendudukan Jepang atas wilayah Indonesia membalikkan struktur masyarakat secara radikal selama tiga tahun, yang seluruhnya digunakan untuk mendukung kedudukan dan kebutuhan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya (Perang Pasifik). Pendekatan yang digunakan Jepang dalam berhubungan dengan rakyat pendudukan berbeda dengan sebelumnya. Pertama, pendudukan Jepang terdiri dari tiga pemerintahan militer untuk tiga region yang berbeda-beda, sehingga perkembangan yang dialami masing-masing region berbeda pula khususnya mengenai perkembangan gerakan nasionalisme. Gerakan ini berkembang pesat di wilayah Jawa di bawah Tentara ke-16 sejauh masih dianggap identik dengan usaha untuk memenangkan Perang, sementara di wilayah Sumatera Tentara ke-25 lebih tertarik pada kekayaan alam pulau tersebut, bahkan di Indonesia Timur tidak ada aktivitas politik di bawah pemerintahan Armada Selatan ke-2.<sup>20</sup> Kedua, Jepang mengadakan hubungan langsung dengan rakyat hingga ke tingkat paling bawah seperti petani dan buruh, berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang memakai penghubung seperti bupati, sehingga pengaruhnya langsung dapat dirasakan oleh rakyat khususnya di desa-desa.<sup>21</sup> Hal ini pula yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat ketika menjelang akhir pendudukan Jepang eksploitasi sumber daya alam maupun manusia lebih keras ditingkatkan, sehingga pemberontakan pun tak terhindarkan di dua tempat di Jawa Barat dan ditumpas secara keji. Ketiga, Jepang mengganti semua aparat Eropa yang ada di pemerintahan (kecuali yang mau bekerja sama) dan memberi kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan.<sup>22</sup> Meskipun kondisi ini bersifat strategis dan berada di bawah pengawasan yang ketat, namun sangat bermanfaat bagi calon-calon petinggi RI untuk mendapatkan pengalaman administrasi dan birokrasi pemerintahan yang sangat jarang bisa didapatkan di masa kolonial. Bahkan lebih jauh lagi, Jepang juga merangkul golongan nasionalis Islam yang pada masa kolonial begitu dicurigai dan ditindas, sekaligus memberikan kesempatan berpolitik

<sup>20</sup> Robert Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945–1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni* (terj. Hasan Basari) (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 6.

<sup>21</sup> Soedjito Sosromihardjo, S.H, M.A, *Perubahan Struktur Masyarakat di Djawa: Suatu Analisa* (Jogjakarta: Penerbit Karya, 1968), hlm. 104.

<sup>22</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia jilid IV* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 13.

bagi mereka dalam wadah Masjoemi.<sup>23</sup> Keempat, menjelang krisis dalam perang yang dihadapinya, Jepang membentuk organisasi-organisasi kepemudaan seperti *Seinendan*, *Keibodan*, *Heiho*, *Suishintai* (Barisan Pelopor) dan Pembela Tanah Air (PETA) yang dididik secara disiplin ala militer dan diperkaya semangat *bushido* untuk siap sedia mempertahankan Jawa jika Sekutu berhasil masuk.<sup>24</sup> Ini merupakan suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial oleh karena ketakutannya sendiri bahwa pribumi dipastikan berontak jika pribumi diberi senjata. Pengalaman seperti inilah yang nantinya membentuk nasionalisme pemuda sekaligus memperkuatnya secara emotif untuk tidak takut kehilangan apapun dalam mempertahankan Tanah Air, meskipun nyawanya sendiri. Dengan demikian, ketika Jepang kalah perang dan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, Masa Bersiap sudah dimulai tepat setelah RI diproklamlirkan dengan selamat.

Sebab mengapa Pemerintah RI pada masa ini cenderung tidak mampu mengendalikan situasi disebabkan oleh posisinya yang dilematis. Kewajiban pemerintah pada saat itu adalah untuk menyusun lembaga-lembaga dan jabatan-jabatan kekuasaan dan administrasi negara dan terutama mencari pengakuan internasional.<sup>25</sup> Sebagai wilayah bekas pendudukan Jepang, tuduhan RI adalah pemberian fasis Jepang setibanya Sekutu di Indonesia adalah hal yang tidak terhindarkan, sehingga untuk mendapatkan pengakuan internasional kerjasama dengan Sekutu adalah hal yang harus dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah walaupun tidak mudah. Apalagi ketika PPKI memutuskan untuk tidak menjadikan PETA sebagai tentara nasional, hal ini dinilai oleh banyak pihak sebagai kekeliruan Pemerintah yang sangat fatal, meskipun sebagai gantinya didirikan Badan Keamanan Rakjat (BKR) sebagai satuan korps bagian dari Badan Penolong Keloearga Korban Perang (BPKKP) yang didirikan di tiap-tiap daerah untuk membantu Polisi memelihara keselamatan dan keamanan rakyat.<sup>26</sup> Ini dilakukan karena pemerintah ingin menampilkan citra RI sebagai negara cinta damai, namun kebutuhan akan tentara nasional ini akhirnya terbukti ketika rongrongan dari dalam negeri bermunculan dan desakan Sekutu semakin keras mengancam pertahanan dan ke-

<sup>23</sup> Lihat karya Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942–1945* (Den Haag dan Bandung: W. van Hoeve, 1958).

<sup>24</sup> Sosromihardjo, *Op.Cit.*, hlm. 101.

<sup>25</sup> Anderson, *Op.Cit.*, hlm 130.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 126–127.

amanan di hampir seluruh wilayah RI. Begitu pula insiden-insiden yang ditimbulkan baik tentara Jepang maupun tentara Sekutu (Gurkha<sup>27</sup>) dan NICA<sup>28</sup> terhadap orang-orang Indonesia semakin jauh memprovokasi dan memperkeruh suasana yang pada dasarnya sudah kacau.

Terjadinya gerakan sosial pada Masa Bersiap berbeda-beda di tiap daerah sesuai batas kedaerahan, unsur etnis-kultural, perspektif kedaerahan dan intensitas praktik kolonial pada masa sebelumnya, yang kemudian membentuk karakteristik lokal suatu daerah dan menentukan interpretasi lokal mengenai Proklamasi.<sup>29</sup> Dalam hal ini peran pemimpin rakyat menjadi penting sebagai organisator semangat rakyat dan aktualisator revolusi berdasarkan karakteristik lokal tersebut.<sup>30</sup> Contoh kasus gerakan sosial pada Masa Bersiap adalah Peristiwa Tiga Daerah di Pekalongan,<sup>31</sup> aksi Dewan Rakyat di Banten,<sup>32</sup> dan revolusi sosial di Aceh dan Sumatera Timur,<sup>33</sup> yang ketiganya secara krusial melemahkan posisi pemerintahan RI di tingkat daerah. Dalam hal ini penulis telah memperhatikan bahwa wilayah Bogor juga mengalami Masa Bersiapnya sendiri.

Latar belakang Bogor cukup panjang sebagai salah satu kota besar di Jawa Barat sebelum kemerdekaan yang memiliki banyak tanah partikelir.<sup>34</sup> Selain di-

<sup>27</sup> Wakil pemuda India dalam sambutan rapat besar Pemoeda Repoebluk Indonesia (PRI) di Bondowoso menerangkan bahwa bangsa Gurkha memiliki negara yang terletak di tapal batas India dan Cina, dekat Tibet di bawah Himalaya, dan memiliki pemerintahan sendiri di bawah pengawasan Inggris. Mereka menjadi anak emas Inggris karena menjadi serdadu, bahkan sejak dalam kandungan telah dibeli oleh Inggris untuk mejadi serdadu. Mereka tidak diakui sebagai bangsa India, memiliki penampilan mirip orang Jepang: berkulit kuning tebal dan tubuh pendek. Budaya mereka berlainan dengan India, baik adat istiadat, agama dan bahasa. Mereka selalu bertentangan dengan bangsa India karena menjadi alat untuk menekan gerakan-gerakan kebangsaan India oleh Inggris, sehingga mereka menjadi musuh bersama golongan nasionalis dan umat Islam India (*Gelora Rakjat*, 10 November 1945).

<sup>28</sup> *Netherlands-Indies Civil Administration* (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda).

<sup>29</sup> Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978), hlm. 317-319.

<sup>30</sup> Kartodirdjo, *Loc.Cit.*, hlm. 6.

<sup>31</sup> Anton Lucas, *One Soul One Struggle: Peristiwa Tiga Daerah dalam Revolusi Indonesia* (Yogyakarta: Resist Book, 2004).

<sup>32</sup> Sri Handajani Purwaningsih, *Pergolakan Sosial-Politik di Serang pada tahun 1945: Kasus Gerakan Aksi Daulat Ce Mamat*, skripsi sarjana (Jakarta, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1984).

<sup>33</sup> Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra* (Jakarta, Sinar Harapan, 1986).

<sup>34</sup> Tanah partikelir merupakan tanah atau lahan pribadi yang memiliki status istimewa di mana pemilik tanah (tuan tanah) memperoleh hak istimewa dari pemerintah (kolonial) untuk menguasai tanah dan penduduk yang hidup di atasnya. Namun karena hak istimewanya itu, seringkali pemilik atau penyewa tanah partikelir melakukan eksploitasi penduduk secara berlebihan, yang menyebab-

perkirakan menjadi ibukota kerajaan Sunda di Pakuan-Pajajaran, Bogor yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda bernama Buitenzorg juga dijadikan pusat pemerintahan selain Batavia. Di sini G.W. van Imhoff pada awal abad XIX membangun rumah peristirahatan sebagai kediaman resmi pejabat gubernur jenderal (sekarang Istana Bogor), dan dilanjutkan dengan diciptakannya *Plantentuin* (Kebun Raya) yang berkembang menjadi salah satu lembaga botani utama di dunia.<sup>35</sup> Selain itu, pada 1886 di tanah partikelir Ciomas pecah perlawanan petani yang berdampak sangat luas hingga memaksa Otto van Rees meletakkan jabatan sebagai Gubernur Jenderal saat itu sampai dipenuhinya tuntutan penghapusan lembaga tanah partikelir oleh Raja Belanda.<sup>36</sup> Ketika wilayah ini berada di bawah pendudukan Jepang dan berganti nama menjadi Bogor-*Shū*, *Bō-ēi Gyūgun Kanbu Renseitai* (asrama perwira Pembela Tanah Air) didirikan sebagai langkah awal pembentukan tentara PETA.<sup>37</sup>

Ciri khas dari Bogor ketika mengalami Masa Bersiap adalah situasi yang agak ‘ganjil’ namun menarik: pemerintahan RI yang dipegang oleh Residen Bogor beserta jajaran staf dan kepolisian sering mengadakan hubungan dengan Sekutu berupa rapat dan diskusi mengenai keamanan di sekitar Bogor, bahkan mengadakan makan malam bersama untuk menunjukkan bahwa RI beritikad baik terhadap Sekutu. Akan tetapi di lapangan, antara tentara, laskar dan pemuda *republikin* dengan tentara Gurkha dan NICA justru saling cegat dan saling tembak.<sup>38</sup> Selagi masih harus menghadapi Sekutu, menjelang akhir tahun 1945 Pemerintah RI di Bogor harus menghadapi Direktorium<sup>39</sup> pimpinan Ki TB. Narija yang melakukan kudeta bahkan berani menyatakan Residen dalam tawanan. Aksi ini nyaris mendapatkan pengakuan dari Pusat yang kurang mendapatkan informasi yang jelas. Akan tetapi aksi ini dapat dengan cepat ditumpas oleh kombinasi kekuatan

---

kan kesejahteraan penduduk pribumi setempat merosot hingga jauh di bawah garis subsistensi (Iskandar, *Loc.Cit.*, hlm. 3).

<sup>35</sup> Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), hlm. 244.

<sup>36</sup> Iskandar, *Loc.Cit.*, hlm. 3.

<sup>37</sup> Nugroho Notokusanto, *Tentara PETA pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia* (Jakarta, Penerbit PT Gramedia, 1979), hlm. 75.

<sup>38</sup> Ramadhan Kartahadimaja, *A.E. Kawilarang untuk Sang Merah Putih: pengalaman 1942 – 1961* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan), hlm. 69.

<sup>39</sup> Direktorium adalah suatu sistem politik di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh beberapa orang sebagai suatu direksi atau dewan yang bersama-sama melaksanakan kekuasaan sebagai kepala negara/daerah.

TKR, Polisi dan laskar-laskar yang setia kepada RI, untuk kemudian memulihkan kembali kedaulatan Residen. Selain itu, di beberapa tempat di Bogor terjadi insiden-insiden yang menimbulkan jatuhnya korban di kalangan orang Eropa dan Indo. Bahkan pada bulan Oktober 1945, distrik Depok menjadi salah satu wilayah yang diwarnai oleh pembantaian massal terhadap orang-orang Eropa, Indo maupun para penganut Kristen.<sup>40</sup> Kegentingan situasi dan kondisi Bogor yang menjadi fenomena Masa Bersiap di wilayah ini menjadi topik utama yang hendak dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

Oleh karena gerakan sosial pada Masa Bersiap muncul dengan latar belakang, faktor pendorong dan pemicu yang berbeda-beda di tiap daerah, maka berakhirnya Masa Bersiap juga berbeda-beda. Jika dititikberatkan pada sampai sejauh mana Pemerintahan RI 'sudah siap' secara materi (baik dari segi pemerintahan, koordinasi pertahanan dan keamanan) untuk melaksanakan revolusinya sekaligus mempertahankan kemerdekaannya, maka kondisi tersebut kiranya sudah dapat diraih setelah Peristiwa 3 Juli 1946 ditumpas sebagai akhir dari masa yang tak menentu tersebut.<sup>41</sup> Sedangkan di Bogor, penulis menetapkan akhir Masa Bersiap setelah pulihnya pemerintahan pada akhir tahun 1945 dan pengakuan komando Sekutu atas kedaulatan Pemerintah Keresidenan Bogor pada awal tahun 1946.

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Untuk dapat mendeskripsikan secara jelas mengenai fenomena Masa Bersiap di wilayah Bogor, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya suasana Bersiap di Bogor?
2. Mengapa suasana Bersiap di Bogor dikatakan 'ganjil'?
3. Apa yang menyebabkan situasi dan kondisi Bogor menjadi genting selama Masa Bersiap?
4. Apa saja dampak dan pengaruh yang muncul setelah Masa Bersiap berakhir di Bogor?

<sup>40</sup> Bussemaker, *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>41</sup> Iskandar, *Loc.Cit.*, hlm. 15.

### 1.3 RUANG LINGKUP MASALAH

Untuk memfokuskan penelitian ini, penulis telah menentukan batasan kerangka waktu, lokalitas dan tema sasaran.

Batasan waktu yang diambil adalah Agustus 1945 hingga Januari 1946. Penulis menganggap penumpasan aksi Direktorium yang dilanjutkan pemulihan kedaulatan pemerintahan Keresidenan Bogor dapat dijadikan momentum bahwa Bogor telah 'siap' untuk mempertahankan kemerdekaan RI sekaligus menjadi akhir dari Masa Bersiap di wilayah ini, seperti yang telah disebutkan di atas.

Lokalitas yang diambil dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota Bogor, yaitu wilayah yang secara administratif merupakan bagian dari Karesidenan Bogor selain Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

Tema yang dijadikan sasaran penelitian adalah bagaimana gerakan sosial terjadi di wilayah Bogor sebagai bagian dari proses perubahan revolusioner pada Masa Bersiap.

### 1.4 TUJUAN PENELITIAN

Revolusi sosial yang terjadi di daerah pada Masa Bersiap memiliki karakteristik struktural yang khas, sehingga sebagai kisah masa lalu dari kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada batas kedaerahan tertentu, penulisan sejarah mengenai revolusi sosial dapat dikategorikan sebagai sejarah lokal. Adanya batasan geografis dalam ruang lingkungannya menyebabkan sejarah lokal dikaitkan dengan sejarah sosial, oleh karena pembahasannya dititikberatkan pada struktur dan proses dari tindakan dan interaksi manusia untuk dapat memahami fenomena yang terjadi pada ruang dan waktu tertentu. Dari sini realitas lokal direkonstruksi secara lebih langsung dan intim, sehingga dapat menyumbangkan warna-warni nuansa lokal bagi sejarah nasional yang ruang lingkungannya lebih luas.<sup>42</sup> Selain itu, hubungan antara revolusi nasional di tingkat pusat dan revolusi sosial di tingkat daerah pada dasarnya adalah hubungan yang saling melengkapi, sehingga posisi sejarah lokal perlu dipertimbangkan dalam historiografi Indonesia supaya sejarah revolusi Indonesia tidak melulu dipandang dari perspektif 'atas' dan 'umum'.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 19.

<sup>43</sup> Cribb, *Op.Cit.*, hlm. 8.

Berdasarkan pertimbangan itulah penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk dapat memahami bagaimana Masa Bersiap sebagai fenomena historis berlangsung di Bogor. Selain itu penulisan ini diharapkan dapat menyumbangkan suatu studi tentang sejarah lokal pada zaman Revolusi Kemerdekaan yang umumnya didominasi oleh kajian dan perspektif 'atas', supaya hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek kedaerahan mampu memperluas wawasan pemahaman mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan RI dan membuka prospek baru dalam historiografi Indonesia.

## 1.5 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terbagi dalam empat tahap secara berurutan, yaitu tahap heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Pada tahap awal penelitian, penulis mengumpulkan berbagai macam sumber yang terkait dengan topik (lihat Sumber Sejarah). Oleh karena keterbatasan sumber lisan yang dapat diperoleh oleh penulis, sumber yang digunakan dalam penelitian ini hanya sumber tertulis.

Sumber-sumber yang sudah diperoleh kemudian dikritisi dari segi fisik (kritik eksternal) maupun isi (kritik internal) untuk mendapatkan fakta yang relevan dengan topik penelitian, kredibilitasnya dapat dipercaya dan sesuai dengan hukum-hukum metode sejarah.<sup>44</sup> Di sini penulis membandingkan sumber yang berasal dari media massa nasional maupun lokal dengan arsip rahasia dan laporan-laporan dari intelijen Belanda, yaitu NEFIS (*Netherlands Forces Intelligence Service*).

Fakta-fakta yang sudah didapat kemudian diinterpretasi oleh penulis dengan cara menguraikan (analisis) dan menyatukan (sintesis) sehingga muncul suatu pandangan baru yang bermakna sesuai dengan landasan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Fakta-fakta yang sudah dimaknai tersebut direkonstruksi dalam urutan yang kronologis dan sistematis untuk memperoleh deskripsi yang jelas berupa situasi, kondisi dan proses berjalannya kejadian, terutama semangat dan suasana zaman dari topik penelitian.

---

<sup>44</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1985), hlm. 46.

## 1.6 SUMBER SEJARAH

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Untuk sumber primer, penulis menggunakan dokumen-dokumen koleksi Arsip Nasional RI yaitu *Algemeene Secretarie* berupa laporan rahasia NEFIS dan laporan RAPWI (*Recovery of Allied Prisoners of War and Internees*) di Bogor. Penulis juga menggunakan koleksi surat kabar yang ada di Perpustakaan Nasional RI: harian *Merdeka*, *Berita Indonesia*, *Tjahaja*, *Berita Oetama*. Namun sumber primer paling penting yang penulis gunakan adalah koleksi surat kabar di Museum Perjuangan Bogor yaitu *Gelora Rakjat* yang terbit pada Oktober, November dan Desember 1945 serta Januari 1946.

Untuk sumber sekunder, penulis menggunakan buku *Sejarah Perjuangan di Kabupaten DT II Bogor (1942–1949)*<sup>45</sup> yang cukup detil menjelaskan bagaimana Bogor menjalani revolusinya. Biografi A.E. Kawilarang<sup>46</sup> sebagai pemimpin Resimen IV Bogor Brigade II/Suryakencana cukup membantu penulis mendapatkan keterangan-keterangan lain yang terkait dengan penumpasan gerakan pengacau keamanan yang berulah di wilayah Bogor. Karya H.Th. Bussemaker<sup>47</sup> juga membantu memperoleh gambaran bagaimana kamp-kamp interniran didirikan di Bogor, termasuk peristiwa-peristiwa tragis yang melibatkan kaum interniran di sana. Beberapa detil yang tidak ada dalam sumber primer mengenai revolusi sosial di daerah termasuk Bogor didapat oleh penulis dalam karya A.H. Nasution.<sup>48</sup> Makalah milik Dr. Moh. Iskandar<sup>49</sup> juga digunakan oleh penulis sebagai dasar pelaksanaan penelitian ini.

Sumber-sumber sekunder yang digunakan penulis diperoleh dari koleksi buku dan jurnal online JSTOR yang dilanggan Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, koleksi buku Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, koleksi jurnal Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan pihak-pihak lain yang telah banyak membantu.

<sup>45</sup> Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, *Sejarah Perjuangan di Kabupaten DT II Bogor 1942–1949* (Bogor: 1986), selanjutnya disebut Pemda DT II Bogor.

<sup>46</sup> Kartamihardja, *Op.Cit.*

<sup>47</sup> Bussemaker, *Op.Cit.*

<sup>48</sup> A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 2: Diplomasi atau Bertempur* (Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit ANGKASA, 1977)

<sup>49</sup> Iskandar, *Loc.Cit.*



## 1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini diberi judul *Bogor pada Masa Bersiap 1945–1946* dengan alasan supaya pembaca dapat memahami bahwa tulisan ini berusaha untuk merekonstruksi suasana dan nuansa Bersiap di wilayah Bogor pada kurun waktu tersebut. Oleh penulis, pembahasan dibagi dalam empat bab.

Bab 1 berisi pendahuluan penelitian, meliputi latar belakang masalah, penetapan fokus dan batasan topik penelitian, metode dan sumber-sumber yang digunakan, yang dirumuskan dalam sistematika sesuai tujuan pembahasan.

Bab 2 berisi perkembangan Bogor sebelum Proklamasi dari menjelang akhir kolonialisme Hindia Belanda hingga menyerahnya Jepang kepada Sekutu, yang memberi pengaruh cukup besar setelah RI diproklamasikan.

Bab 3 berisi gambaran wilayah Bogor pasca-Proklamasi pada Masa Bersiap, terutama pengaruh konflik antara RI, Sekutu dan NICA, yang kemudian menimbulkan kekacauan-kekacauan politik dan sosial setempat.

Bab 4 berisi rangkuman pembahasan berdasarkan rumusan dan batasan yang sudah ditentukan sebelumnya, dan kesimpulan.

Tambahan catatan mengenai ejaan nama tokoh dan nama tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk nama tempat, penulis akan menggunakan nama yang sudah memakai ejaan baru supaya lebih mudah diketahui dan dikenali, sedangkan untuk nama tokoh, penulis memutuskan untuk memakai nama dengan ejaan lama (*oe* untuk *u*, *dj* untuk *j*, *j* untuk *y*) sesuai yang telah tercantum dalam sumber.

## BAB 2

### BOGOR SEBELUM PROKLAMASI

#### 2.1 BUITENZORG MENJELANG AKHIR MASA HINDIA BELANDA

Bogor pada saat ini berkembang menjadi salah satu kota satelit Jakarta yang dikenal sebagai tempat rekreasi dan peristirahatan bagi masyarakat ibukota. Ternyata kondisi ini sudah berlangsung sejak masa kolonialisme bangsa Eropa, dilihat dari nama lamanya yaitu Buitenzorg yang dalam bahasa Belanda berarti tanpa kesibukan. Nama ini merupakan terjemahan kasar dari bahasa Perancis *sans-souci* yang memiliki arti sama.<sup>50</sup>

Menjelang akhir abad XVIII Bogor atau Buitenzorg lebih dikenal sebagai tempat peristirahatan petinggi Batavia dan lahan partikelir yang mayoritas dikuasai oleh orang-orang kaya dan tuan-tuan tanah Belanda dan Cina. Begitu istimewa tanah partikelir tersebut sehingga para tuan tanah bebas menggunakan hak dan kuasanya atas lahan dan penduduk pribumi yang menempatinnya. Hal ini menyebabkan eksploitasi manusia yang tak jarang berlebihan dan menimbulkan keresahan di kalangan pribumi yang kemudian memuncak dalam pergolakan sosial. Salah satu peristiwa yang menarik adalah pemberontakan petani di Ciomas pada 1886 yang memiliki dampak yang sangat luas, bahkan sampai menyebabkan Gubernur Jendral Hindia Belanda saat itu yaitu Otto van Rees meletakkan jabatannya. Tuntutan agar partikelir dihapuskan akhirnya dikabulkan oleh pemerintah Belanda dengan cara membeli tanah-tanah tersebut dari para pemiliknya sejak 1917 sampai 1931. Namun pembelian ini berhenti setelah krisis ekonomi dunia melanda pada tahun 1920-an.<sup>51</sup>

Pada awal abad XX, sebagai perwujudan kebijakan politik etis yang diterapkan oleh Ratu Belanda, Undang-undang Desentralisasi tahun 1903 diterbitkan dengan tujuan untuk menghapus sistem pemerintahan tradisional dan menggantinya dengan sistem administrasi pemerintahan yang modern. Sebagai realisasinya dibentuk *Staadsgemeente* yang antara lain adalah *Gemeente Batavia*,<sup>52</sup> *Gemeente*

---

<sup>50</sup> Vlekke, hlm. 243.

<sup>51</sup> Iskandar, *Loc. Cit*, hlm. 3

<sup>52</sup> *Staatsblad* 1903 no. 204.

Meester Cornelis,<sup>53</sup> *Gemeente Buitenzorg*,<sup>54</sup> *Gemeente Bandung*,<sup>55</sup> *Gemeente Cirebon*<sup>56</sup> dan *Gemeente Sukabumi*<sup>57</sup>. Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasi yang ada (antara lain ketidakjelasan tugas dan fungsi *Burgermeester*) maka terbitlah Ordonansi Perubahan Tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (*Staatsblad* 1922 No. 216). Tiga tahun kemudian, provinsi Jawa Barat dibentuk (*Staatsblad* 1924 No. 378 *bij Province West Java*) yang terdiri dari lima keresidenan (*Residentie*), 18 kabupaten (*Regentscapen*) dan enam kotapraja (*Staadsgemeente*). Setelah itu terbitlah Ordonansi Kabupaten yang memuat ketentuan-ketentuan daerah Otonomi Kabupaten (*Staatsblad* 1925 No. 79).

Sejak diberlakukannya Undang-undang 1931 No. 425, Kabupaten Buitenzorg digabungkan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur menjadi Keresidenan Buitenzorg dengan kota Buitenzorg sebagai pusatnya.<sup>58</sup> Keresidenan ini terdiri dari tujuh kewedanaan (*district*) di masing-masing kabupaten, 19 kecamatan (*onderdistrict*) di kabupaten Buitenzorg dan 21 kecamatan baik di kabupaten Sukabumi maupun Cianjur (lihat lampiran 1).

Pada paruh ketiga abad XX, Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jendral Jhr. de Jonge yang terkenal di kalangan nasionalis Indonesia sebagai gubernur jendral paling kolot dan kasar. Sebagai akibat dari pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Banten pada 1926, kebijakan politik etis berubah menjadi kaku, konservatif dan sangat reaksioner terhadap segala aspirasi yang berkaitan dengan tuntutan kemerdekaan Indonesia terutama yang secara terang-terangan mengambil sikap nonkooperatif.<sup>59</sup> Sementara itu, kaum nasionalis menganggap bahwa Hindia Belanda telah mengingkari janji-janji mereka sendiri untuk meninjau ulang struktur kekuasaan Dewan Rakyat dan administrasi birokrasinya, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan kaum nasionalis terhadap pemerintahan kolonial.

Di dalam suasana sosial politik Hindia Belanda yang terasa sangat gerah, suasana di Bogor pada saat itu umumnya terkendali. Di beberapa tempat terlihat

<sup>53</sup> *Staatsblad* 1905 no. 206.

<sup>54</sup> *Staatsblad* 1905 no. 208.

<sup>55</sup> *Staatsblad* 1906 no. 121.

<sup>56</sup> *Staatsblad* 1906 no. 122.

<sup>57</sup> *Staatsblad* 1914 no. 310.

<sup>58</sup> Iskandar, *Loc. Cit.*, hlm. 4.

<sup>59</sup> Ongkhokham, *Runtuhnya Hindia Belanda* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1998), hlm. 43.

kumpulan massa, akan tetapi kumpulan tersebut tidak berada di bawah kontrol para pemimpin pribumi setempat melainkan rasa ingin tahu masyarakat atas orasi yang dilakukan, bahkan diragukan apakah mereka benar-benar mengerti sepenuhnya tentang kapitalisme dan imperialisme yang diserukan. Penekanan orasi diberikan bahwa kemiskinan yang diderita oleh pribumi merupakan akibat dari kekuasaan Belanda di Hindia, sehingga jika Indonesia merdeka maka kebebasan yang sesungguhnya benar-benar diperoleh. Akan tetapi orasi tersebut tidak diberikan secara lantang dan terbuka seperti sebelumnya. Para pemimpin organisasi massa setempat (terutama yang dicap beraliran ekstrimis kiri) 'sudah dihimbau' supaya kata-kata mereka tidak kelewat batas atau intervensi pemerintah akan diberikan. Tekanan juga dilakukan terhadap sekolah-sekolah Taman Siswa di wilayah keresidenan atas dasar kecurigaan ketika pemberitahuan inspeksi oleh pemerintah ditolak oleh pengurus sekolah pada akhir tahun 1932.<sup>60</sup>

Oleh karena tekanan pemerintah terhadap gerakan nasionalis pribumi semakin intensif, pada umumnya organisasi-organisasi mencoba untuk tetap menyebarkan pemikiran-pemikiran nasionalisme mereka dengan lebih mendekati diri secara intim pada masyarakat awam, daripada berorasi di depan umum secara langsung. Seperti yang dilakukan pengurus Perhimpunan Indonesia (P.I.) Bogor yang mengadakan diskusi dan rapat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum di warung-warung. Dengan suasana santai dan nyaman ditemani secangkir teh dan hidangan ringan, perbincangan mengenai situasi dan kondisi politik yang aktual hingga program dan tujuan organisasi lebih mudah dilakukan dan disebarluaskan. Di pihak lain, Partai Nasional Indonesia (PNI) melakukan kaderisasi terhadap sebagian guru pribumi di desa-desa supaya nantinya mereka dapat menanamkan dan meneruskan ideologi nasionalisme kepada murid-muridnya.<sup>61</sup>

Yang menarik adalah perkembangan organisasi Al Ittihadijatoel Islamijah Ahli Soennah wal Djamaäh (A.I.I.) yang didirikan oleh Hadji Ahmad Sanoesi pada November 1931. Meskipun masih berstatus tahanan di Batavia, dukungan masyarakat terhadap beliau dan organisasinya semakin meningkat terutama di kabupaten Sukabumi. Di Bogor juga tercatat adanya perkembangan cabang A.I.I. yang

<sup>60</sup> *Politieke Toestand* dalam *Memorie van Overgave der Residentie Buitenzorg van den Aftreden Resident van Buitenzorg Mr. P.M. Letterie 1933*, hlm. 234 (selanjutnya disingkat *Pol.Toest.*).

<sup>61</sup> *Pol.Toest.*, hlm. 236.

mulai intensif. Bahkan banyak anggota AII merupakan orang PI maupun PNI. Organisasi ini menjadi bukti kecurigaan pemerintah setempat bahwa para haji yang terdiri dari kyai dan pengurus mesjid sangat dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi pemerintah sendiri belum dapat memastikan apakah kelompok-kelompok massa yang sering terlihat berkumpul di sekitar Bogor adalah hasil perbuatan para haji atau bukan.<sup>62</sup>

Satu dekade berikutnya, suasana politik Hindia Belanda diperkeruh oleh pengaruh politik di Eropa. Pada 10 Mei 1940 tentara Jerman menyerbu Belanda, empat hari kemudian Ratu dan pemerintahannya mengungsi ke London sebelum esoknya menyerah dan wilayah Belanda diduduki Jerman.<sup>63</sup> Praktis perhatian umum pada saat ini lebih ditujukan pada Perang Eropa, bahkan kaum nasionalis menyatakan keprihatinan dan loyalitasnya kepada Ratu Belanda. Meskipun demikian, kekhawatiran pemerintah kolonial bukanlah okupasi Jerman yang dihadapi Belanda melainkan ancaman penyerangan Jepang yang datang dari utara. Langkah-langkah politik global yang dilakukan Jepang sejak kemenangannya dalam perang melawan Rusia pada 1904, produk-produk impor asal Jepang yang banyak beredar di Hindia Belanda dengan harga sangat murah hingga tindakan keluar dari Liga Bangsa-Bangsa pada 1933 sudah menjadi kecurigaan bagi Hindia Belanda bahwa Jepang telah berkembang sebagai kekuatan yang besar dan sewaktu-waktu mengancam koloni besar milik Belanda tersebut.<sup>64</sup>

Kecurigaan tersebut semakin beralasan ketika Jepang meminta agar impor-pornya atas bahan-bahan mentah dan strategis (seperti gula dan minyak bumi) diperbesar. *Move* politik yang semakin intensif pada 1941 diikuti *move* militer yang agresif yang memuncak pada peristiwa Pearl Harbour menjelang akhir tahun membuktikan kecurigaan tersebut.<sup>65</sup> Invasi Jepang ke wilayah Asia Pasifik dijawab dengan dibentuknya blok ABDA (*American British Dutch Australia*) yang komandonya (ABDACOM) ditempatkan di Lembang, Bandung. Akan tetapi, blok ini pun tidak dapat menghentikan laju penyerbuan Jepang ke tempat-tempat strategis

<sup>62</sup> *Pol.Toest.*, hlm. 237. Mengenai AII lihat Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat 1900 – 1950* (Yogyakarta: Penerbit Mata Bangsa, 2001).

<sup>63</sup> Onghokham, *Op.Cit.*, hlm. 1.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

di Hindia Belanda. Secara bertahap pada Februari 1942, Jawa terkepung setelah jatuhnya Tarakan, Palembang dan Bali. Pada 1 Maret 1942 tentara Jepang merapat di Banten (Merak dan Bojonegara) dan Indramayu (Eretan Wetan), yang membuka jalan menuju pusat pemerintahan yang telah terpaksa mengungsi ke Bandung.<sup>66</sup>

Pasukan Jepang yaitu Divisi II yang berada di bawah komando Mayjend. Maruyama Masao memasuki wilayah keresidenan Buitenzorg melalui jalur Rangkasbitung, Banten. Sebelum memasuki Leuwiliang, pasukan ini bergerak mulai dari Lawangtaji (Jasinga) lalu ke gunung Galuga (Leuwiliang) dengan menelusuri jalan Puraseda, menyeberang sungai Cianten dan terus naik ke gunung Handeleum, gunung Kijakimun, di daerah Cimayang, Cibeureum. Mereka mendobrak benteng Lawangtaji secara kilat dan terlibat pertempuran di Kijakimun, dengan hasil tentara Sekutu dapat dipukul mundur sampai kampung Bantar Karet. Di daerah Leuwiliang pasukan Jepang bertemu dan bertempur melawan pasukan Hindia Belanda yang diperkuat tentara *Black Force* dari Australia, namun hal ini tidak berarti apa-apa.<sup>67</sup>

Leuwiliang jatuh pada 5 Maret 1942 diikuti kota Buitenzorg, sebelum Jepang meneruskan invasinya ke Cibadak dan Cianjur menuju Bandung.<sup>68</sup> Setelah menduduki Leuwiliang, pasukan Jepang meneruskan perjalanan menuju Bogor melalui Semplak dengan melewati Cilendek. Perlawanan yang diberikan pemerintah Belanda ketika Jepang memasuki Bogor tidak terlalu sulit untuk ditaklukkan. Dibentuknya *Stadswacht* (Pasukan Penjaga Kota) yang terdiri dari orang Belanda dan pribumi pun tidak mampu membendung invasi Jepang di kota itu. Tentara Belanda yang terdesak mundur ke arah Bandung, bahkan mengalami kekacauan akibat tekanan pasukan Jepang dari arah Bogor sebelah barat maupun Jakarta. Keberhasilan pasukan Jepang dalam menjatuhkan benteng Lawangtaji dan memenangkan pertempuran Kijakimun tidak dapat dilepaskan dari dukungan penduduk setempat yang menyambut mereka dengan suka cita, bahkan mendukung posisi me-

<sup>66</sup> AH. Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid I: Proklamasi* (Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit ANGKASA, 1977), hlm. 84.

<sup>67</sup> Susanto Zuhdi, *Bogor-Shū pada Masa Pendudukan Jepang: 1942 – 1945*, skripsi sarjana (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1979), hlm. 21.

<sup>68</sup> Nasution, *Sekitar Perang ... Jilid I*, hlm. 87.

reka dengan sikap tidak membantu tentara Belanda dan sekutunya untuk mempertahankan Bogor.<sup>69</sup>

Mengenai invasi Jepang ke Hindia Belanda, pada umumnya rakyat Indonesia mengambil posisi sebagai penonton. Sebagian besar dari mereka (terutama di Jawa) diyakinkan oleh ramalan Jayabaya yang mengatakan bahwa Jawa akan diperintah oleh sekelompok orang katé yang telah mengusir orang kulit putih namun pemerintahan mereka hanya berlangsung seumur jagung. Sebagian lagi terpesona dengan kekuatan dan jargon Jepang yang akan memimpin Asia supaya setara dengan bangsa Eropa. Akan tetapi pada umumnya rakyat memang sudah tidak lagi simpati dengan Belanda, baik kalangan politisi maupun rakyat kebanyakan sehingga mereka cenderung bersikap untuk tidak mendukung orang Belanda. Misalnya pada saat Hindia Belanda diinvasi, Barisan Perusak (*Vernielingsploegen*) dibentuk untuk melaksanakan politik bumi hangus, yaitu untuk menghancurkan semua instalasi dan fasilitas yang dapat memberikan keuntungan bagi Jepang jika dikuasai. Namun hal ini sering tidak terlaksana akibat sabotase yang dilakukan oleh rakyat, selain keengganan anggota Barisan itu sendiri untuk melakukan perusakan seperti yang telah diperintahkan.<sup>70</sup>

Kedatangan tentara Jepang di wilayah ini membuat keadaan yang tenang di Bogor, Cicurug, Parangkuda dan Cibadak berubah menjadi kacau. Terjadi perampokan di rumah-rumah dan toko-toko milik orang Cina, termasuk villa (rumah peristirahatan) milik orang Belanda yang ditinggal mengungsi oleh pemiliknya masing-masing.<sup>71</sup> Perampokan-perampokan ini kemudian ditindak secara tegas oleh Jepang untuk menegakkan keamanan dan ketertiban. Tiga hari kemudian, Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942 di Kalijati, sekaligus menandai berakhirnya kolonialisme Belanda dan dimulainya masa pendudukan Jepang.

---

<sup>69</sup> Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

## 2.2 SITUASI DAN KONDISI BOGOR-SHŪ HINGGA BERAKHIRNYA OKUPASI JEPANG

Tidak seperti pada masa Hindia Belanda yang merupakan kekuasaan tunggal, wilayah Indonesia pada masa pendudukan Jepang terbagi dalam tiga wilayah pemerintahan:<sup>72</sup>

1. Pemerintahan militer Angkatan Darat (Rikugun) Tentara ke-16 untuk Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi.
2. Pemerintahan militer Angkatan Darat (Rikugun) Tentara ke-25 untuk Jawa-Madura dan Bali yang berkedudukan di Batavia/Jakarta.
3. Pemerintahan militer Angkatan Laut (Kaigun) Armada Selatan ke-2 untuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku yang berkedudukan di Makassar.

Wilayah Bogor dengan demikian berada di bawah Pemerintahan Tentara ke-25.

Usaha untuk membentuk pemerintahan setempat dilakukan dengan menghapus segala kekuasaan yang dulu dipegang oleh orang-orang Eropa. Supaya kekacauan dapat dicegah dan pemerintahan dapat terus berjalan, Jepang memutuskan untuk tetap menggunakan aparat pemerintahan sipil yang lama dan seluruh pegawainya, dengan memecat dan menawan semua aparat kulit putih yang tidak menunjukkan sikap mau bekerja sama. Hal ini sekaligus untuk menjawab kesulitan ketika kapal yang membawa tenaga pemerintahan dari Jepang tenggelam ditembak torpedo oleh Sekutu, sehingga orang Indonesia mendapat kesempatan untuk meraih pengalaman birokrasi yang sebelumnya pada masa Hindia Belanda kemungkinan tersebut sangat kecil.<sup>73</sup> Pada 29 April 1942, Kolonel Matsui menjadi Gubernur Jawa Barat didampingi oleh R. Pandoe Soeradiningrat sebagai wakil dan Atik Soardi sebagai pembantu wakil Gubernur. Di saat yang bersamaan diangkat beberapa residen, termasuk R.A.A. Soerjadjanegara yang diangkat sebagai Residen Bogor.<sup>74</sup>

Struktur administrasi pemerintahan juga masih sama, hanya berganti nama sesuai Undang-undang nomor 27 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah: Keresidenan menjadi *-Shu*, Kabupaten/*Regenschap* menjadi *-Ken*, Kotamadya/*Staadsgemeente* menjadi *-Shi*, Kewedanaan/*District* menjadi *-Gun*, Kecamatan/

<sup>72</sup> Poesponegoro, *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

<sup>74</sup> *Ibid*.



*Onderdistrict* menjadi -*Su* dan Desa menjadi -*Ku*. Jadi Keresidenan Buitenzorg berganti nama menjadi Bogor- *Shū*, begitu pula daerah-daerah lain kecuali Surakarta dan Yogyakarta. Pemerintahan pun berubah dengan digantinya Residen orang Indonesia dengan orang Jepang, ketika jabatan *Shuchokan* dipindahkan dari Soeadjajanegara ke Sonoyama (lihat lampiran 2).

Stratifikasi sosial yang sudah bertahan beberapa abad pada masa kolonialisme Belanda dibalikkan 180 derajat pada masa pendudukan Jepang. Orang Eropa dan Timur Asing yang dulunya menjadi warga kelas satu, kini menjadi warga kelas rendah. Orang Belanda *totok* dan asing mendapat pengawasan yang lebih ketat: yang belum didaftarkan dilarang meninggalkan rumah kecuali untuk bekerja, bahkan harus meminta izin kepada Bogor-*Shūchōkan* hanya untuk berobat ke dokter.<sup>75</sup> Orang pribumi naik satu level lebih tinggi dan yang memiliki keahlian khusus diangkat menjadi pegawai-pegawai pemerintah; suatu hal yang sangat kecil kesempatannya bagi seorang *inlander* yang memperoleh pendidikan hingga jenjang universitas di waktu sebelumnya. Langkah ini menunjukkan usaha Jepang untuk menarik simpati pribumi dalam usaha perang mereka, dengan ‘mendidik adik-adik’ mereka di bawah ‘bimbingan’ melalui organisasi-organisasi kepemudaan diatur di bawah satu pengawasan.<sup>76</sup> Pembentukan organisasi ini dilakukan cukup merata di seluruh wilayah Jawa dan Bali, termasuk di Bogor. Yang paling menyolok adalah didirikannya Asrama Perwira Pembela Tanah Air (*Boéi-Gyugun Kanbu Renseitai*) di kota Bogor.

Dampak dibangunnya Tentara PETA sangat besar dan menarik banyak perhatian rakyat. Di kalangan masyarakat, kedudukan seorang perwira PETA memiliki status sosial yang tinggi, bahkan dalam beberapa kasus lebih tinggi daripada kepala daerah. Pakaian seragam kehijauan lengkap dengan sepatu bot dan atribut *katana* merupakan lambang yang mendekati kebesaran seorang perwira Jepang, sehingga tidak mengherankan pembukaan pendaftaran perwira PETA yang baru membludak.<sup>77</sup> Selain itu, pelatihan dan pendidikan teknologi militer baru didapatkan orang Indonesia dari lembaga PETA, suatu hal yang mustahil diraih pada masa Hindia Belanda yang selalu penuh curiga dengan permintaan kaum nasi-

<sup>75</sup> *Soeara Asia*, 23 Desember 2602.

<sup>76</sup> Poesponegoro, *Op.Cit.*, hlm. 29.

<sup>77</sup> Sosrodihardjo, *Op.Cit.*, hlm.107.

onalis untuk membentuk suatu korps pribumi. Terdapat 66 *daidan* di Jawa dan 3 *daidan* di Bali, sementara di Bogor-*Shū* ada empat *daidan*: Jampang Kulon, Pelabuhan Ratu, Cibeber dan Cianjur.<sup>78</sup>

Bagi Jepang sendiri, pembentukan tentara PETA adalah sebuah usaha untuk menarik perhatian rakyat Indonesia supaya mereka memiliki keterampilan yang memadai jika sewaktu-waktu Sekutu menyerbu Jawa. Hal tersebut logis mengingat posisi Jepang yang sebelumnya ofensif menjadi defensif setelah jatuhnya Saipan pada pertengahan 1943. Kekalahan semakin banyak diderita menjelang tahun 1944. Selain membentuk PETA, Jepang juga membentuk Jawa *Hokokai* (Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa) yang tidak hanya untuk keperluan pengerahan tenaga yang lebih besar namun juga untuk lebih memperketat pengawasan kepada penduduk akibat mulai timbul berbagai pemberontakan dari kalangan Islam maupun militer.<sup>79</sup> Di Bogor, Bogor-*Shū Hokokai* dibentuk dan bersidang pada Mei 1944 untuk membahas cara-cara praktis untuk meningkatkan semangat rakyat dan agar rakyat dapat menempatkan kedudukannya serta mampu hidup hemat.<sup>80</sup> Pendekatan dilakukan juga terhadap golongan kyai dengan membuka kursus bahasa Jepang di bulan yang sama supaya para kyai dapat lebih dekat berkomunikasi dengan orang Jepang sekaligus menghilangkan salah paham.<sup>81</sup>

Meskipun demikian, desas-desus mengenai kekalahan Jepang sudah tersebar di kalangan orang Indonesia. Menurut wawancara dengan *daidanchō* Abdullah bin Nuh, dugaan akan kekalahan Jepang itu sudah ada. Pada awal bulan Agustus 1945, ia beserta anak buahnya sedang bertugas di Ujung Genteng yang mungkin dimaksudkan untuk menjaga pulau Jawa dari selatan. Saat itu para pengawas Jepang melucuti pasukan-pasukan PETA, dengan alasan bahwa senjata-senjata itu sudah usang dan perlu diganti dengan yang baru.<sup>82</sup> Beberapa minggu kemudian berita radio yang mengumumkan menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945 didengar secara diam-diam karena pemerintahan penduduk sendiri menyensor berita kekalahan ini dan tidak menyatakan hal tersebut secara resmi. Dengan demikian Jepang diperintahkan untuk menjaga *status quo*

<sup>78</sup> Notosusanto, *Op.Cit.* hlm. 99.

<sup>79</sup> Anderson, *Op.Cit.*, hlm. 48.

<sup>80</sup> *Tjahaja*, 17 Mei 2604.

<sup>81</sup> *Tjahaja*, 20 Mei 2604.

<sup>82</sup> Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm. 223–224.

dan oleh sebab itu secara sepihak bersikap lepas tangan terhadap janji-janji kemerdekaan Indonesia.

Secara umum, dampak positif maupun negatif dari pendudukan Jepang khususnya di wilayah Bogor berjalan paralel. Jepang mengetahui persis pengaruh agama Islam di Bogor dan bagaimana perkembangannya, sehingga kerjasama di bidang pemerintahan melibatkan tokoh-tokoh Islam selain tokoh-tokoh intelektual (nasionalis). Maka untuk menarik simpati rakyat Bogor, pemerintah Jepang menawarkan jabatan *Fuku-Shūchōkan* (Wakil Residen) kepada KH. Ahmad Sanoesi pada tahun 1944, yang menjadi salah satu kyai ortodoks yang menduduki jabatan eksekutif.<sup>83</sup> Tujuannya jelas, yaitu untuk menggerakkan umat Islam Bogor supaya tetap mendukung Jepang. Tidak hanya KH. Ahmad Sanoesi, sejumlah tokoh nasional tingkat daerah Bogor muncul dalam struktur pemerintahan, yang nantinya berperan dalam pemerintahan RI. Pelatihan perwira PETA oleh Jepang juga melahirkan sejumlah tokoh yang kemudian memegang peran penting dalam pertahanan dan keamanan pada masa RI, misalnya Ibrahim Adjie, Doele Abdoellah, Moeslihat dan H. Dasoeki Bakri.

Di sisi lain, dampak negatif yang dirasakan rakyat Bogor adalah penderitaan akibat pengerahan potensi sumber daya alam dan manusia yang diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan perang Jepang, yang semakin intensif digalakkan setelah posisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya mulai terdesak. Upaya Jepang untuk menggalang tenaga rakyat dalam meningkatkan pertahanan dilakukan dengan memperkenalkan sistem Romusha yang pada praktiknya adalah pengerahan tenaga kerja secara paksa. Banyak yang kehilangan nyawa akibat perlakuan buruk dan kelaparan, misalnya ketika banyak Romusha yang tewas tertimbun ketika diadakan penggalian emas di Cikotok ataupun pembangunan lapangan terbang di Cikoleang, Rumpin. Selain itu, kehidupan rakyat terutama di pedesaan semakin kritis terutama yang terkait dengan kebutuhan primer. Rakyat terpaksa memakai kain karet yang harus diberi bedak supaya tidak lengket. Sprei dan pembungkus kasur digunakan sebagai pelindung tubuh. Mayat tidak lagi dibungkus dengan kain kafan namun dengan tikar. Bahkan ketupat sayur berubah menjadi ancemon sayur dan pastel berisi daging bekicot mulai banyak dijual. Pagar besi dicabut oleh

---

<sup>83</sup> Benda, *Op.Cit.*, hlm. 282.

Jepang untuk menjadi bahan peluru.<sup>84</sup> Akibat keadaan yang serba sulit inilah timbul perasaan antipati terhadap Jepang dan pembangkangan pun tak terhindarkan.

### 2.3 BERITA PROKLAMASI DI BOGOR

Penyebarluasan berita Proklamasi dari Jakarta ke daerah-daerah seluruh Indonesia tidak dapat disampaikan saat itu juga karena teknologi yang saat itu belum memadai dan adanya halangan dari Kenpetai yang ditugaskan untuk menjaga ketertiban,. Bogor yang secara geografis berada tepat di selatan Jakarta juga tidak semerta-merta langsung mendapatkan kabar itu. Oleh karena hubungan para pemimpin nasional daerah Bogor memang lebih dekat ke Bandung dan berita Proklamasi melalui corong Radio Republik Indonesia (RRI) dikumandangkan dari Bandung untuk pertama kalinya setelah pemuda dapat merebut kantor berita *Domei*, maka diduga rakyat Bogor mengetahui berita kemerdekaan dari Bandung.<sup>85</sup> Dampak yang timbul dari interpretasi rakyat tentang Proklamasi juga berbeda-beda yang kemudian mempengaruhi jalannya Revolusi Kemerdekaan yang awalnya disebut sebagai Masa Bersiap.

Sebelumnya, janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada ‘sang adik’ bangsa Indonesia melalui pengumuman *Saikoshikikan* tentang pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia umumnya disambut antusias, termasuk di Bogor. Pada siang hari tanggal 10 Agustus 1945 dilangsungkan rapat besar di Bogor yang dihadiri segenap penduduk Asia, pemuda dan murid-murid sekolah untuk mendengarkan *Bogor-Kenchokan* membacakan pengumuman tersebut, yang kemudian ditutup dengan orasi Gatot Mangkoepradja untuk membangkitkan semangat rakyat.<sup>86</sup> Bahkan usaha untuk menyebarkan penerangan tentang Indonesia Merdeka telah diwujudkan dengan dilangsungkannya musyawarah pertama para propagandis di *Bogor-Shuchokan* pada 16 Agustus 1945 supaya mereka dapat

<sup>84</sup> Pemda DT II Bogor, *Op.Cit.*, hlm. 31.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 224.

<sup>86</sup> *Tjahaja*, 10 Agustus 2605. Agak aneh mengapa pengumuman janji Jepang mengenai nasib Indonesia ‘di kemudian hari’ yang sudah ada sejak September 1944 baru disampaikan di Bogor pada Agustus 1945.

lebih terang dalam menjelaskan cita-cita tersebut, antara lain dengan memakai cerita-cerita wayang.<sup>87</sup>

Bukan tanpa alasan mengapa reaksi sebagian besar rakyat saat mendengar berita Proklamasi pertama kali adalah bimbang. Pemerintahan pendudukan hingga pertengahan bulan Agustus 1945 tetap berjalan seperti biasa seakan tak terjadi apa-apa. Rumor mengenai kekalahan Jepang atas Sekutu memang ada, namun hanya tersebar di beberapa kalangan sehingga tidak sampai terdengar oleh penduduk di pelosok daerah. Bahkan ada pula yang menganggap Proklamasi tak lain hanya salah satu propaganda Jepang.<sup>88</sup> Akan tetapi para pemuda Bogor di bawah pimpinan R. Ijok Mohamad Sirodz telah bertindak cepat untuk mengambil alih kekuasaan Jepang dengan meminta mereka supaya mau menyerahkan gedung Bogor-Shuchokan kepada para pemuda. Pendekatan tersebut berhasil dengan dinaikkannya Merah Putih menggantikan Hinomaru pada 19 Agustus 1945.<sup>89</sup> Rakyat baru benar-benar percaya bahwa negara milik bangsa Indonesia yang bernama Republik Indonesia telah lahir melalui Proklamasi ketika pada 22 Agustus 1945 Jepang menyatakan untuk menghentikan peperangan di wilayah Asia Timur Raya terhadap Sekutu, diikuti dengan pernyataan Presiden RI terpilih Soekarno bahwa rezim lama telah tumbang dan era baru telah datang.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Tjahaja, 17 Agustus 2605.

<sup>88</sup> John Smail, *Bandung in the early revolution, 1945-1946; a study in the social history of the Indonesian revolution* (Ithaca, New York: Cornell University Library, 1964), hlm. 36–37.

<sup>89</sup> Tjahaja, 19 Agustus 2605.

<sup>90</sup> *Ibid.*

### BAB 3

#### BOGOR SETELAH PROKLAMASI

#### 3.1 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN RI DI BOGOR

Pembentukan Pemerintahan RI di Bogor juga dibentuk segera setelah gedung *Shuchokan* diduduki pada 20 Agustus 1945. R. Ijok Moh. Sirodz ditunjuk sebagai Residen dan dibantu oleh staf:<sup>91</sup>

Wakil Residen	: R. Barnas Wiratanoeningrat
Sekretaris	: S. Soerja Hudaja
Pemerintahan	: R. Hardjadiprata
Kemakmuran	: Boenawan Roesmipoetra
Kepala Polisi Kabupaten	: Enoch Danoebrata
Kepala Polisi Kota	: Hartono
Ketentraman	: Doele Abdoellah
Sosial	: Djajoesman

Sementara itu, di gedung Sekolah Kehutanan Menengah Tinggi Bogor diadakan rapat pembentukan BKR Bogor pada 23 Agustus 1945. Rapat ini dihadiri oleh pengurus BPKKP dan mantan Chudancho dan Daidancho seluruh Bogor, misalnya Doele Abdoellah yang kemudian diangkat menjadi kepala BKR, Ibrahim Adjie, Abing Sarbini, Toha, Effendi Natasapoetra, H. Dasuki Bakri dan Moeslihat. Sebagai pengurus BKR untuk Bogor kabupaten dan kota ditunjuk Kaprawi, untuk Sukabumi ditunjuk H. Basjoeni dan untuk Cianjur ditunjuk Rd. Abdoellah bin Noch.<sup>92</sup>

Pembentukan perangkat daerah disesuaikan dengan keputusan yang diterima dari Pusat. Pada 25 Agustus 1945 Komite Nasional Indonesia (KNI) Keresidenan Bogor diresmikan sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah Daerah maupun Pusat. Selanjutnya di tingkat kecamatan dan desa juga dibentuk KNI untuk masing-masing tingkatan. KNI Bogor dipimpin oleh R. Odang selaku wali kotamadya Bogor, dengan anggota

<sup>91</sup> Pemda DT II Bogor, *Op.Cit.*, hlm. 39.

<sup>92</sup> *Tjahaja*, 3 September 2605.

tiga perwakilan dari Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Cianjur: dokter Zahar, dr. Aboe Hanifah dan Oewen Amiapoetra.<sup>93</sup>

Di Bogor, Proklamasi memberikan warna baru. Antusiasme masyarakat Bogor terhadap Proklamasi meramaikan kegiatan para penduduk. Keamanan diatur oleh pihak Polisi dan dibantu oleh penduduk dari bermacam lapisan. Perdagangan terutama bahan-bahan pangan (lauk, sayur dan beras) dan barang-barang keperluan sehari-hari menjadi lebih ramai karena harga barang menjadi turun. Jalan-jalan dalam kota mulai dibersihkan, diperbaiki dan diaspal terutama di Jembatan Merah dan Jembatan Baru. Sejak 29 Agustus, penduduk mulai mengibarkan Merah Putih di tiap-tiap rumah dan perusahaan dengan bahan yang disediakan seperlunya oleh Hokokai. Yang tidak dapat mengibarkan bendera dari kain secara kreatif membuat bendera dari kertas yang ditempelkan di muka rumah maupun di dada. Sementara itu para pemuda bergerak ke kampung-kampung untuk memberikan penerangan ke-pada penduduk di pelosok mengenai keadaan dan suasana sekarang.<sup>94</sup>

Akan tetapi Pemerintahan Jepang di Bogor-*Shū* yang dipegang oleh *Shūchōkan* Hakateda masih bertahan oleh karena perintah *Saikoshikikan* untuk mempertahankan *status quo* di seluruh wilayah pendudukan dan hanya dapat menyerahkan kedaulatan kepada Sekutu yang akan tiba sebentar lagi. Sikap ini mengundang reaksi para pendukung RI yang langsung mengadakan rapat-rapat kilat dan pertemuan untuk menggabungkan kekuatan. Pada 30 September 1945 sebuah rapat kilat dihadiri oleh para Bupati dan Walikota, pimpinan BKR, KNI, Barisan Pelopor, Kepolisian dan laskar-laskar lainnya, yang memutuskan untuk memperoleh kekuasaan Bogor dari Jepang dengan jalan damai dan jika tidak berhasil penyerbuan total akan dilakukan. Untuk itu mereka mengundang *Shūchōkan* dan menyatakan maksud mereka dan memberitahukan bahwa semua kekuatan telah bersatu untuk menyerbu jika *Shūchōkan* tidak dapat bekerja sama. *Shūchōkan* yang sadar posisi diri maupun pemerintahannya akhirnya bersedia menyerahkan kekuasaan tanpa syarat kepada RI di Bogor.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Pemda DT II Bogor, *Op.Cit.*, hlm. 40.

<sup>94</sup> *Tjahaja*, 3 September 2605.

<sup>95</sup> Pemda DT II Bogor, *Op.Cit.*, hlm. 41.

Pada 1 Oktober 1945 secara resmi berdiri Keresidenan Bogor yang merupakan bagian dari RI. R. Ijok Moh. Sirodz ditunjuk menjadi Residen yang pertama sesuai dengan susunan yang sudah dibentuk dua minggu sebelumnya. Upacara pelantikan berlangsung sejak pukul 8 pagi dan dihadiri oleh para bupati, wali kota, wakil-wakil kantor RI, anggota Komite Nasional dan tokoh-tokoh terkemuka di wilayah Bogor. Dalam upacara ini pula ditegaskan bahwa Residen menyerukan kepada seluruh penduduk untuk menegakkan keamanan dan ketentraman umum, dan menjalankan segala perhubungan baik dengan Sekutu maupun bangsa-bangsa lain dengan dasar disiplin dan diplomatis. Sebagai langkah pertama pemerintahannya, Residen akan memperteguh keamanan dan mengambil alih perusahaan-perusahaan asing untuk diurus orang-orang Indonesia.<sup>96</sup>

Sebagai modal awal untuk mempertahankan kemerdekaan, para pemuda dan pejuang RI di Bogor melakukan pelucutan dan perampasan persenjataan yang dimiliki tentara Jepang, termasuk pengambilalihan gedung-gedung dan fasilitas-fasilitas umum yang penting, yang sudah dimulai sejak gedung Bogor-Shuchokan diduduki kaum *republikein*. Peristiwa ini terjadi sepanjang September 1945. Setiap tentara Jepang yang terlihat langsung diserukan '*siaaap!*' untuk disergap dan dilucuti persenjataannya. Stasiun Bogor dan pos-pos kereta api di luar kota Bogor diambil alih oleh para pemuda yang tergabung dalam Lasykar 33 pimpinan Harun Kabir, yang notabene anggotanya adalah para pegawai KA itu sendiri. Penyerbuan terhadap markas *Kidobutai* di Nanggung, Leuwiliang dilakukan oleh Lasykar Rakjat dan Hizbullah setempat dan berhasil merampas 11 ekor kuda, empat mobil *pick-up*, sebuah pistol dan 16 blok kain Merah Putih, sekaligus menawan 253 orang tentara Jepang untuk diserahkan kepada BKR. Di tempat lain, Lasykar Rakjat dari Barisan Pelopor menyerang kamp tentara Jepang yang masih ada di lapangan Cikoleang, Rumpin. Serangan ini berhasil memukul mundur tentara Jepang hingga ke perbatasan Bogor-Tangerang.<sup>97</sup>

Sampai pertengahan September 1945, situasi dan kondisi Bogor pada umumnya stabil, meskipun aksi pelucutan senjata dan penawanan tentara Jepang masih sering dilakukan. Sebagai pihak yang telah kalah perang dan kehilangan kekuasaannya, tentara Jepang tidak lagi ditakuti. Beberapa peristiwa yang menyang-

<sup>96</sup> *Merdeka*, 5 Oktober 1945.

<sup>97</sup> Pemda DT II Bogor, *Op.Cit.*, hlm. 43.



kut ‘keberanian’ orang Indonesia terhadap tentara Jepang misalnya adalah ketika Angkatan Moeda Bogor berhasil menahan sembilan *wagon* bahan pakaian yang hendak diangkut keluar (diselundupkan) dari Bogor. Bahan pakaian tersebut nantinya dibagikan kepada penduduk miskin yang sangat membutuhkan.<sup>98</sup> Pada awal Oktober 1945, diketahui bahwa sekitar 150 tentara Jepang bersenjata lengkap hendak berangkat dari Jakarta menuju Bogor menggunakan kereta api. Berita ini segera menyebar dengan cepat, yang kemudian menyebabkan ratusan rakyat, pemuda, BKR, Polisi dan Pelopor turun tangan untuk menghadang kereta api tersebut. Namun penghadangan gagal dilakukan karena kereta tersebut dihalangi peti-peti sehingga sulit untuk didobrak. Antara Bojonggede dan Cilebut, penggeledahan berhasil dilakukan dan para pemuda menemukan mesiu dan peluru dalam tumpukan peti dan bermacam sejenis senjata. Tentara Jepang ini nyaris dibantai di Cilebut jika tidak dicegah oleh Polisi dan Pelopor. Setibanya di stasiun Bogor, pasukan ini dilucuti dan diserahkan kepada yang berwajib sebagai tawanan.<sup>99</sup>

### 3.2 KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DI BOGOR

Ketika usaha para *republikein* untuk merebut kekuasaan sipil dan militer Jepang berada pada puncaknya, pasukan Inggris atas nama Sekutu datang. Mereka pertama kali mendarat di lapangan udara Kemayoran, Jakarta, pada 14 September 1945 dengan pasukan terjun payung di bawah pimpinan Mayor Greenhalgh, yang bertugas untuk mempersiapkan pembentukan Markas Besar Serikat (Sekutu) di Jakarta. Kedatangan Greenhalgh disusul dengan berlabuhnya kapal penjelajah HMS Cumberland yang mendaratkan pasukan Sekutu di Tanjung Priok pada 29 September 1945. Pasukan ini merupakan komando bawahan dengan tiga divisi dari SEAC (*South-East Asia Command*) bernama AFNEI (*Allied Forces Netherlands East Indies*) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison.<sup>100</sup> Sementara perwira Sekutu yang bertugas untuk wilayah Jawa, Bali, Madura dan Lombok adalah Mayor Jenderal D.C. Hawthorn, DSO yang mendirikan markas besar di Jakarta (Betawi). Kewajiban tentara Sekutu di Indonesia yaitu:<sup>101</sup>

<sup>98</sup> *Merdeka*, 7 Oktober 1945.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Poesponegoro, Op.Cit., hlm. 121-122.

<sup>101</sup> *Ma'loemat dari Major General D.C. Hawthorn, DSO. Panglima Tentara Darat Serikat di Jawa, Bali, Madoera dan Lombok*, 13 Oktober 1945.

1. Menjaga dan menolong APWI (tawanan dan korban perang) atas nama Sekutu.
2. Mengganti tentara Jepang yang sekarang menjaga keamanan dalam negeri.
3. Menjaga ketentraman dan keadilan di daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Sekutu.
4. Mengumpulkan seluruh pasukan Jepang yang ada di beberapa tempat di Jawa untuk ditempatkan di tempat tawanan terakhir setelah mengambil senjatanya, sampai mereka siap dipulangkan ke Jepang.
5. Menyelenggarakan Pemerintahan Militer Serikat di tempat-tempat yang diduduki Sekutu.

Khusus di Jawa Barat, Christison dan stafnya bersama Markas Besar Divisi Infantri ke-23 Gurkha bertempat di Jakarta, sementara Brigade 1 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal R.C.M. King dan Brigade 37 bertempat di Bandung dan Bogor.<sup>102</sup>

Tentara Sekutu berhasil memasuki Bogor pada 22 Oktober 1945. Dua hari kemudian, pimpinan tentara Sekutu di Bogor segera mengadakan kontak dengan Markas Besar Pertahanan Negara Keresidenan Bogor dan meminta supaya diadakan *staat van beleg* (keadaan perang) seperti di Jakarta, Bandung dan Semarang. Status keadaan perang tersebut dimaksudkan supaya Sekutu dapat menjaga keamanan. Markas Besar yang saat itu diwakili oleh Residen R. Barnas Wiratanoe-ningrat, Aboe Oemar, Oemar Sanoesi dan Mr. Tirtawinata menolak permintaan tersebut. Mereka memberikan alasan kepada Sekutu bahwa keadaan Bogor sudah aman sehingga *staat van beleg* tidak perlu diadakan. Jika dipandang perlu, maka Markas Besar sendiri yang akan bertindak karena jika Sekutu yang melakukannya dikhawatirkan rakyat Bogor akan kecewa.<sup>103</sup>

Permintaan Sekutu lainnya adalah hak untuk menguasai gudang-gudang dan pabrik-pabrik makanan supaya pembagian makanan kepada rakyat dapat terjamin bila ada kegentingan. Hal ini ditolak pula dengan alasan jika Sekutu yang menguasai kebutuhan utama rakyat maka dikhawatirkan akan timbul keragu-raguan di kalangan rakyat. Sekutu juga meminta hak untuk menindak segala aksi pemogokan yang dilakukan rakyat yang tidak mau bekerja sama dengan Sekutu.

<sup>102</sup> Bussemaker, *Op.Cit.*, hlm. 84.

<sup>103</sup> *Gelora Rakjat*, 8 November 1945.

Lagi-lagi hal ini ditolak, karena autoritas RI di Bogor berani menjamin bahwa aksi-aksi mogok tersebut akan ditindak tegas, sesuai dengan kewajiban yang diperintahkan oleh Pusat untuk bekerja sama dengan Sekutu.<sup>104</sup>

Setelah diadakan perundingan beberapa kali, tercapailah tiga buah kesepakatan antara RI dengan Sekutu di Bogor:<sup>105</sup>

1. *Staat van beleg* tidak diadakan. Yang akan dilakukan hanyalah tindakan-tindakan praktis untuk mengadakan peraturan penjamin keamanan dan ketentraman umum yang kelak diterbitkan secara resmi di dalam Maklumat Pemerintah Daerah pada 28 Oktober 1945. Sebagai tindakan preventif, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa seluruh penduduk umum selain Polisi dan BKR dilarang membawa senjata ke jalan raya: senjata api maupun senjata tajam yang tidak lazim dipakai untuk bekerja.
2. Peraturan tersebut hanya akan dilakukan oleh Pemerintah RI di Bogor, bukan Sekutu. Di sini Polisi dan TKR menjadi alat kekuasaan pemerintah untuk memelihara keamanan dan ketertiban di sekitar Bogor.
3. Tujuan kedatangan Sekutu di Bogor adalah untuk menjaga keamanan dan hanya akan bertindak jika diminta bantuan.

Pada 5 November 1945, pucuk pimpinan tentara Sekutu di Bogor berganti. Letnan Kolonel Greenway dan Poelay pindah ke Bandung, lalu posisi mereka dipindahkan kepada Mayor Mohamad Sarwar Khan dan Mayor Mayden. Setelah pergantian jabatan tersebut, diadakan pertemuan antara tentara Sekutu dengan Residen dan pembesar Polisi RI dalam suasana yang 'ramah dan saling menghargai.' Pertemuan ini kemudian menyimpulkan hasil-hasil sebagai berikut:<sup>106</sup>

1. Dibentuk *Contactlichaam* [*sic!*] atau Badan Perhubungan di bawah pimpinan Rd. Odang selaku walikota Bogor yang terdiri dari delapan bagian, antara lain polisi dan keamanan. Badan ini berfungsi sebagai penghubung semua hal-hal yang berhubungan dengan tentara Sekutu maupun RAPWI, sementara perkara-perkara yang penting akan diurus oleh Residen.

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Gelora Rakjat*, 13 November 1945.

<sup>106</sup> *Ibid.*

2. Keamanan tetap dipegang oleh Polisi RI dan tentara Sekutu tidak akan ikut campur urusan politik dalam negeri. Pihak Inggris bersedia memberi bantuan untuk menjaga keamanan apabila diminta.

Akan tetapi, kehadiran tentara Sekutu rupanya tidak hanya untuk memelihara keamanan atas para tawanan dan korban perang semata. Di dalam organisasi tentara Sekutu di Indonesia telah masuk pegawai-pegawai NICA yang akan digunakan Inggris untuk mendirikan pemerintahan sipil di wilayah bekas pendudukan Jepang dan memberikan hak mengurus tawanan perang kepada organisasi RAP-WI, sesuai dengan *Civil Affairs Agreement* antara Inggris dan Belanda.<sup>107</sup> Dengan kata lain, Belanda hendak membangkitkan kembali pemerintahan kolonialnya yang telah runtuh tiga tahun yang lalu, yang tentunya mengundang reaksi penolakan yang sangat besar dari kalangan pendukung RI, termasuk di Bogor.

Untuk menghadapi kehadiran tentara Sekutu di Bogor supaya tidak ada kesimpangsiuran informasi keamanan dan pertahanan, Markas Barisan Rakyat Keresidenan Bogor dibentuk pada awal Oktober 1945, yang terdiri dari TKR, Polisi, Pelopor dan laskar-laskar rakyat. Segala perangkat peraturan, maklumat dan siaran kilat hanya boleh dilakukan dan disebar oleh Markas Besar.<sup>108</sup> Siaran kilat Markas Barisan Rakyat pertama kali dilakukan pada 10 Oktober 1945, yang memaklumkan supaya kaum perempuan Belanda dan Indo yang membutuhkan pertolongan bisa mendapatkan perlindungan di Gedung *Ursulinenklooster*.<sup>109</sup> Maklumat penting lainnya adalah pernyataan bahwa kota dan kabupaten Bogor dalam keadaan perang dengan NICA-Belanda, sehingga segala pelanggaran yang dapat merusak tenaga berperang bangsa Indonesia akan dihukum dengan hukuman militer. Di sini disebutkan pula bahwa Polisi sudah dimasukkan ke dalam organisasi TKR.<sup>110</sup> Sejak 16 Oktober 1945 jam malam diberlakukan antara pukul 8 malam sampai 6 pagi. Semua orang harus tinggal di dalam rumah; bagi yang melanggar bisa ditembak, kecuali yang menjalankan pekerjaan dengan memakai ban lengan khusus.<sup>111</sup>

<sup>107</sup> Yahya A. Muhamin, *Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia 1945 – 1946* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hlm. 23.

<sup>108</sup> Pemda DT II Bogor, *Op.Cit.*, hlm. 45.

<sup>109</sup> *Siaran Kilat Markas Besar Barisan Rakjat*, 10 Oktober 1945.

<sup>110</sup> *Siaran Kilat Markas Besar Barisan Rakjat*, 14 Oktober 1945.

<sup>111</sup> *Siaran Kilat Markas Besar Barisan Rakjat*, 16 Oktober 1945.

### 3.3 KEGENTINGAN DI SEKITAR BOGOR

Oktober 1945 menjadi awal dari kekacauan-kekacauan yang terjadi di Bogor. Dilaporkan bahwa minggu-minggu pertama bulan ini terjadi penculikan-penculikan yang dilakukan kaum *republikein* terhadap orang-orang Eropa. Meskipun sudah berdiri otoritas RI di Bogor, namun pada kenyataannya otoritas tersebut tidak benar-benar menguasai situasi dan kondisi yang sebenarnya, selain kaum pemuda dan laskar-laskar setempat. Pengawasan yang masih kurang pada saat itu belum cukup untuk mencegah antusiasme para pendukung RI yang melampiaskan perasaan tersebut kepada orang-orang asing, terutama orang Eropa dan Indo, dengan cara yang berlebihan. Di wilayah Keresidenan Bogor, ada dua kamp Bersiap (kamp interniran) yang terletak di Depok dan Bogor.

Situasi di Depok sangat mencekam pada bulan ini sehingga beberapa orang Depok yang beragama Kristen berangkat ke Jakarta untuk meminta bantuan keamanan dari Sekutu. Namun permintaan tersebut ditolak dengan alasan tidak ada perintah resmi, dan mereka kembali ke Depok dengan tangan hampa.<sup>112</sup> Di sisi lain, teror yang dilakukan para pemuda semakin meningkat dan mencapai puncaknya pada 10 Oktober 1945. Rumah-rumah dijajah (digedor), sementara orang-orang yang tidak dapat melarikan diri ditangkap dan dikumpulkan di beberapa lumbung dekat halaman balaikota. Di sini 33 orang Kristen Depok tewas. Di tempat lain, kaum laki-laki dewasa Depok diculik dan dibawa ke Bogor, menyisakan kaum perempuan dan anak-anak. Sekitar 1050 perempuan dan anak-anak ditawan di suatu lumbung yang sangat sempit, tanpa makanan dan minuman yang memadai. Para pemuda rupanya hendak membakar lumbung itu selagi masih ada banyak manusia di dalam sana.<sup>113</sup>

Lebih lanjut, pada 13 Oktober 1945 dilaporkan 10 orang warga Depok dibunuh. Semua penduduk Eropa diburu oleh BKR dan Pelopor (dikenali dari ban/pita yang diikatkan di lengannya). Mereka ditangkap dan dikumpulkan di belakang stasiun Depok (Depok Lama). Di tempat itu, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak ditelanjangi hingga tersisa pakaian dalam saja, sementara semua pakaian dan perhiasannya dirampas oleh para pe-rampok yang ada di

<sup>112</sup> Bussemaker, *Op.Cit.*, hlm. 146.

<sup>113</sup> *Ibid.*

tempat itu di bawah pengawasan Barisan Pelopor.<sup>114</sup> Keterlibatan BKR dan Pelopor dalam aksi-aksi perampokan ini kontradiktif dengan tugas dan kewajibannya memelihara keamanan dan ketertiban. Sejauh ini, penyebab umum mengapa kedua golongan ini terlibat karena lemahnya koordinasi Polisi dan BKR yang seharusnya menjaga keamanan, termasuk sikap pasif aparat RI untuk menindak tegas aksi-aksi tersebut.<sup>115</sup> Ini yang menyebabkan pihak-pihak yang berwajib cenderung tidak berdaya dalam menumpas para aktor penganiaya orang-orang Eropa dan Indo selama Masa Bersiap.

Pembunuhan dan perampokan di Depok terjadi di sekitar distrik Depok sampai Kalibata. Orang-orang Kristen yang dapat menyelamatkan diri lari ke kamp NICA di Jakarta untuk mencari perlindungan.<sup>116</sup> Pada 16 Oktober 1945, seorang wartawan bernama Johan Fabricius yang mengendarai sepeda motor dari Jakarta ke Bogor langsung menyadari bahwa di Depok telah terjadi sesuatu yang salah, dan melaporkannya kepada Sekutu di Bogor. Sore itu juga satu peleton tentara Gurkha di bawah pimpinan Letnan de Winter sampai di tempat kejadian untuk menyelamatkan kaum interniran tersebut. Esoknya, para tawanan dikumpulkan dan dikirim ke kamp Bogor. Dua orang gadis tewas tertembak peluru nyasar ketika sedang dievakuasi.<sup>117</sup>

Malam hari pada 11 dan 12 Oktober 1945, penduduk Eropa di Bogor (laki-laki dan anak laki-laki) dipaksa untuk bangun dari tempat tidur mereka di bawah todongan senjata. Pelaku penculikan ini diduga mayoritas adalah anggota BKR dan Pelopor, terlihat dari pakaian yang mereka gunakan. Secara bertahap tawanan Eropa ini dibawa ke penjara tua di Pledang dan dimasukkan ke dalam sel. Bahkan ketua Palang Merah Internasional Mr. W.A.P.C. Pennink ditangkap dan diberondong pertanyaan di Markas BKR apakah Palang Merah Internasional merupakan representasi dari NICA dan apakah dia adalah agen NICA, yang dijawab oleh Pennink dengan misi dan tujuan Palang Merah Internasional yang bersifat netral.

---

<sup>114</sup> Iskandar, *Loc.Cit.*, hlm. 10–11.

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid II*, hlm. 530. Ketika peristiwa ini terjadi, Nasution menjabat sebagai Kepala Staf TKR Jawa Barat dan sempat melihat-lihat sekitar Depok ditemani Mayor Effendi. Diceritakan kepadanya bagaimana cara pembunuhan dilakukan dengan keji dan diperlihatkan suatu sumur di mana dibenamkan beberapa orang sekaligus yang sudah menjadi mayat.

<sup>117</sup> Bussemaker, *Op.Cit.*, hlm. 146.

Pertanyaan tersebut terus-menerus diulang disertai intimidasi dan dijawab dengan jawaban yang sama, namun dia tetap dimasukkan ke penjara Pledang.<sup>118</sup>

Penjara tua ini sebenarnya memiliki kapasitas maksimum untuk 300 orang, namun saat itu 1200 orang tawanan yang ditangkap dari Bogor dan Depok dijejalkan masuk. Satu sel yang hanya cukup untuk enam orang dipaksakan muat untuk 25 orang. Ruangan lain yang hanya cukup untuk 47 orang dipaksakan muat untuk 140 sampai 160 orang. Yang tidak dapat masuk ke dalam sel harus tinggal di luar dengan sedikit perlindungan dari angin dan hujan. Para tawanan menjalani hari demi hari sepanjang Oktober di bawah teror dan dalam kondisi yang sangat tidak memadai (jika kata ‘manusiawi’ agak berlebihan). Mereka tidak diberi waktu untuk keluar dari sel selama 48 jam kecuali tiga menit untuk mandi. Makanan yang diberikan juga sekedarnya: sarapan pukul 7 pagi dihidangkan gaplek (namun diganti dengan tepung maizena yang direbus setelah diprotes Palang Merah Internasional), sementara untuk makan siang dihidangkan nasi (175-200 gram) ditambah labu air yang direbus dan dipotong-potong tanpa dikupas. Peralatan makan tidak pernah dicuci dan makanan tak terlindung dari hinggapan lalat. Untuk tidur, para tawanan hanya diberi tikar dalam jumlah terbatas sehingga sebagian tidur beralaskan tanah sambil tetap berdesak-desakan. Jendela sel ditutup dengan papan dan hanya tersisa pintu masuk sebagai ventilasi satu-satunya.<sup>119</sup>

Beberapa insiden terjadi di dalam penjara ini. Penganiayaan adalah pemandangan sehari-hari. Beberapa orang tawanan berkebangsaan Belanda diculik oleh anggota BKR dan Pelopor tanpa sepengetahuan kepala penjara, yang mengindikasikan bahwa orang-orang tersebut dipilih berdasarkan dendam pribadi. Kedelapan orang Belanda tersebut memang tak pernah kembali setelah diculik.<sup>120</sup> Menjelang akhir Oktober, tentara Inggris menginspeksi penjara tersebut dan mengadakan kerjasama dengan kepala penjara untuk memindahkan para tawanan ke kamp-kamp pengungsian. Proses ini tidak berlangsung lama dan hanya dalam

---

<sup>118</sup> Kamp Comité 14e Bat, *Verslag van de Ongeregelheden en de Wederwaardigheden van de door de Indonesiërs Geïnterneerde Europese Mannelijke Ingezetenen te Buitenzorg en Omgeving van begin October tot 22 October 1945*, Buitenzorg, 27 October 1945.

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Salah satu orang Belanda yang diculik itu adalah W. Gobeë yang pada masa Hindia Belanda memiliki jabatan sebagai *Adviseur voor Inlandsche Zaken*. Sedangkan tujuh nama lainnya adalah F.A.H.Th.Verbeek, J.P.Rooze Jr., Bröckl Sr., J.Th.White, H.H.Piroeli, J.A.Beemer dan H.R.Lentze (*Ibid.*).

waktu dua hari seluruh tawanan yang tersisa sudah dimasukkan ke dalam kamp di Pabaton (lihat lampiran 4).<sup>121</sup> Ada empat kamp pengungsian utama di Bogor: kamp Ke-doenghalang sebagai kamp utama, kamp *Ursulinenklooster* (bekas kantor *Shucho-kan*) untuk interniran perempuan, kamp *14é Bataljon* di Pabaton dan kamp Kota-paris.<sup>122</sup>

Di Bogor memang berkembang desas-desus bahwa orang-orang Eropa dan Indo akan dihabisi, sehingga ketakutan menerpa mereka dan menyebabkan mereka tak mampu keluar dari Bogor untuk mencari keamanan. Namun sasaran para pemuda juga ditimpakan pada tentara Jepang. Pada 12 November 1945 terjadi penyerbuan pemuda terhadap kamp tentara (interniran) Jepang yang ada di Pondokgede dekat Cigombong, Ciawi. Letnan kolonel Kawagishi dan 41 tentara Jepang ditemukan dalam sebuah kuburan massal lima hari kemudian, tak jauh dari situ.<sup>123</sup> Kamp ini memang sering diserang sampai tiga kali meskipun pihak keamanan RI memerintahkan pemuda untuk tidak menyerangnya. Jepang baru kemudian meninggalkan kamp ini pada pertengahan 1946. Mereka menyerahkan beberapa barang, termasuk sebuah peti besar yang dikira berisi obat-obatan ternyata hanya berisi kondom.<sup>124</sup> Para pemuda juga tidak segan-segan menghukum sesama sendiri yang telah nyata mengancam keamanan Bogor, seperti yang dilakukan Pak Oente yang bersama gerombolannya sering bertindak onar di sekitar *landhuis* Dramaga. Dia dibekuk pada 10 November 1945 di Jampang untuk kemudian dibawa ke kantor polisi Bogor dengan truk. Sesampainya di sana, dia diseret ke tengah-tengah kebun dan digantung di atas sebuah *paal*. Di dekatnya ditempelkan kertas bertuliskan *INI KAKI TANGAN NICA*.<sup>125</sup>

Peristiwa-peristiwa dan konflik yang terjadi sepanjang Oktober dan November melahirkan bom waktu yang meledak pada Desember 1945. Insiden-insiden yang terjadi pada bulan ini meningkat, baik yang dilakukan pihak *republikein* maupun Sekutu, dalam hal ini Gurkha dan NICA. Pada 8 Desember 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum supaya Istana Bogor yang diduduki oleh para pemuda di bawah pimpinan A.K. Yusuf diserahkan kepada Sekutu. Ultimatum tersebut lang-

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Bussemaker, *Op.Cit.*, hlm. 147.

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Kartahadimaja, *Op.Cit.*, hlm. 86.

<sup>125</sup> *Gelora Rakjat*, 13 November 1945.



sung ditolak oleh aparat pemerintahan dan keamanan RI. Namun pada akhirnya pihak RI terpaksa meninggalkan Istana oleh karena perintah Ketua KNIP saat itu yaitu Sutan Sjahrir untuk tetap bekerja sama dengan Sekutu, termasuk dengan mematuhi permintaan Sekutu yang bertujuan sesuai dengan tugasnya yaitu untuk menjaga keamanan.<sup>126</sup> Seluruh petinggi pemerintah RI dan keluarganya diungsikan ke Dramaga di bawah kawalan satu regu polisi.

Sementara itu, setelah Istana jatuh ke tangan Sekutu, Inggris memperluas kekuasaannya dengan menduduki bengkel de Vries, pabrik Good Year dan kamp *Ursulinenklooster*. Diduga peningkatan aktivitas *raid* Sekutu didasarkan pada laporan rahasia NEFIS yang menyebutkan huru-hara yang terjadi di sekitar Depok dan Bogor merupakan gerakan yang terorganisir yang berlokasi di perkebunan swasta (*private estate*) Cimanggis yang menjadi pusat latihan (militer) para pemuda dan gudang senjata yang sangat lengkap. Kelompok ini berencana untuk menyerang orang-orang Eropa pada 25 dan 26 Desember 1945 serta malam Tahun Baru 1946 dengan keyakinan bahwa pada saat itu orang-orang Eropa akan lebih banyak minum minuman keras yang menyebabkan mereka mabuk sehingga penyerangan akan lebih mudah dilakukan.<sup>127</sup>

Tindakan Sekutu tersebut ditanggapi dengan diadakannya rapat di kalangan pejuang RI yang tergabung dalam Markas Besar untuk membalas tindakan Sekutu, yang akhirnya semua pihak menyetujui untuk menyerang Sekutu.<sup>128</sup> Pertempuran pun dimulai segera setelah iring-iringan Sekutu di daerah Bojongsokosan, Cibadak, Sukabumi diserang oleh para pejuang RI pada 9 Desember 1945. Peristiwa ini begitu menggemparkan Inggris bahkan sampai menjadi bahan pembicaraan di Parlemen Kerajaan Inggris. Sekutu langsung menuduh RI tidak mampu menegakkan keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Barat<sup>129</sup> Pertempuran Bojongsokosan sepertinya merupakan bagian dari rencana penyerangan yang dilakukan pejuang RI Bogor untuk membalas tindakan Inggris, karena penyerangan dilakukan secara mendadak pada malam itu juga tepat setelah ultima-

<sup>126</sup> Pemda DT II Bogor, *Op.Cit.*, hlm. 49.

<sup>127</sup> NEFIS HQ, *Report Ddo. 8/12/1945 No.EC6/20684/G*, 9 Desember 1945. Dalam laporan ini disebutkan tiga nama yang melarikan diri setelah penyerangan di Jakarta (Batavia) di sekitar Mr. Cornelis dan Pasar Matraman, yaitu Rameli, Mamat dan Soekardjo. Namun tidak dijelaskan ketiga orang ini mewakili kelompok politik apa selain ketiganya adalah para pemimpin Barisan Pelopor.

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> Poesponegoro, *Op.Cit.*, hlm. 123.

tum Inggris dikeluarkan, yang dilaksanakan dengan gabungan kekuatan TKR dan laskar-laskar pendukung RI.

Inggris membalas serangan yang dilakukan pejuang RI dengan membombardir Cibadak dari pesawat terbang pada 10 Desember 1945. Secara berturut-turut pada 16, 17 dan 18 Desember 1945 Inggris melakukan pengeledahan, pembakaran dan menembaki rumah-rumah penduduk di Panaragan Kidul, Gunung Batu, Gang Kapatihan dan Lebak. Begitu juga di sekitar Bogor seperti di Teluk Pinang (Ciawi), Cinangneng, Depok, Ciluar, Cijeruk, Sindangbarang, Cikereteg dan Pagentongan. Serangan-serangan yang dilakukan Inggris di titik-titik vital pertahanan RI membuat para pejuang terpaksa mengundurkan diri dari kota. Selain itu, perbedaan persediaan logistik dan pengalaman perang juga mempengaruhi keadaan dan kekuatan pejuang RI.<sup>130</sup>

Untuk meredakan situasi di Bogor, Panglima Komandemen I Jawa Barat Mayor Jenderal Abdul Kadir bersama ajudan Kapten A.J. Mokoginta datang ke Bogor dari Purwakarta untuk berunding dengan pihak Inggris. Hasil perundingan menyebutkan bahwa TKR harus keluar dari kota Bogor demi kelancaran repatriasi tentara Jepang dan APWI dari Bogor dan sekitarnya. Polisi Negara dan Polisi Tentara boleh berada di Bogor dan berpatroli bersama dengan Polisi Militer Serikat. Sejak itulah Inggris menganggap satuan-satuan bersenjata yang bergerak di dalam kota adalah kaum 'ekstrimis'.<sup>131</sup> Di luar kota Bogor, TKR masih bisa bergerak dengan leluasa. Pertempuran-pertempuran baru agak mereda setelah Sekutu meninggalkan Kotaparis.

Keputusan untuk mengikuti kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat menimbulkan perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan kaum *republikein* sendiri. Jatuhnya Istana Bogor menyebabkan Residen beserta alat-alat kelengkapan negara lainnya terpaksa menyelenggarakan pemerintahan dari luar kota Bogor untuk sementara. Tanpa disangka, setibanya di Dramaga, Ciomas, Pemerintah Keresidenan Bogor harus menghadapi aksi kudeta yang menyatakan dirinya sebagai Direktorium yang dipimpin oleh Ki Narija, dibantu

<sup>130</sup> Pemda DT II Bogor, *Op.Cit.*, hlm. 50.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

oleh Wargo, S. Tjipto, M. Ali dan Soekandar, sementara Ismail Ning menjadi penasihat.<sup>132</sup>

Ki Narija sendiri disebut sebagai ‘bapak rakyat’ yang memiliki pengaruh di wilayah Dramaga dan Ciomas. Pada awal kemerdekaan, Ki Narija mendirikan Lasykar Hitam yang memiliki anggota kurang lebih 5000 orang dari wilayah Dramaga dan Ciomas. Pada 27 Oktober 1945, diadakan Rapat Umum di Desa Pe-tir, Dramaga untuk membicarakan bagaimana cara untuk menjaga keamanan dan kemakmuran wilayah partikelir tersebut. Dalam rapat ini, Ki Narija hadir sebagai pembicara utama diikuti Moenandar, Moh. Joesoef dan Soegito, yang memutuskan bahwa akan dibentuk suatu Dewan Rakjat yang akan memenuhi tujuan tersebut. Sebagai ketua terpilihlah Ahmad dengan wakil Sjahroni dan penulis (sekretaris) Marta. Tujuh desa yang ada di Dramaga masing-masing mengirimkan wakilnya sebagai anggota dewan.<sup>133</sup>

Ketika hampir semua petinggi daerah beserta keluarganya mengungsi ke Dramaga, kesempatan ini digunakan oleh Lasykar Hitam dan Dewan Rakjat untuk ‘mengganti Residen’ oleh karena Residen dianggap ‘tidak revolusioner’. Namun hal ini tidak diketahui oleh Residen sampai meletusnya aksi pada Minggu pagi, 23 Desember 1945. Kepala Polisi Enoch yang tidak ikut mengungsi pada hari itu datang berkunjung ke Dramaga dan mendengar kabar bahwa di sekitar Dramaga berkumpul banyak sekali barisan orang-orang berbaju hitam (pasukan hitam) di kampung-kampung. Dari sini dia mendengar tentang aksi daulat tersebut. Berita ini segera dirundingkan dengan Residen dan Kepala TKR. Pasukan TKR langsung di datangkan menuju Dramaga, lalu dikembalikan lagi karena tidak terjadi hal-hal yang mengganggu ketenangan dan ketertiban.<sup>134</sup>

Dalam kesempatan ini Wargo membawa resolusi kepada Residen untuk menyerahkan kekuasaannya pada ‘Direktorium’. Residen menolak permintaan tersebut, dan karena tidak berhasil Wargo mundur dan kembali bersama teman-te-

<sup>132</sup> *Gelora Rakjat*, 22 Desember 1945. Dalam koran ini dan sumber NEFIS nama Ki Narija ditulis sebagai *Kjai Narija*, yang memberikan kesimpangsiuran informasi apakah Narija adalah seorang kyai ahli agama atau kyai ahli ilmu kebatinan. Oleh karena keterbatasan sumber yang dapat diperoleh, penulis tidak dapat menemukan keterangan mengenai siapa Narija, bagaimana latar belakangnya, apa ideologinya dan terutama seperti apa kesepakatan yang disusun oleh Narija dan kelima orang lainnya untuk membentuk Direktorium dan melancarkan kudeta.

<sup>133</sup> *Gelora Rakjat*, 31 Oktober 1945.

<sup>134</sup> Nasution, *Sekitar ... Jilid II*, hlm. 534.

mannya beserta gerombolan pasukan hitam. Kepala Polisi sempat mengusulkan diri kepada Residen untuk membebaskan diri dan kembali dengan bantuan dari kota, namun usul ini ditolak oleh Residen untuk menghindari pertumpahan darah sesama bangsa. Wargo kemudian memaklumkan bahwa semua petinggi daerah berada 'dalam tahanan'. Ki Narija didaulat sebagai Residen baru dan menyatakan dirinya sebagai pemegang Pemerintahan Direktoratium di Keresidenan Bogor. Residen dan Kepala TKR digiring ke Cikampek, Ciampea sebagai tawanan. Enoch yang diangkat sepihak menjadi Kepala Polisi Direktoratium berusaha supaya Ki Narija mau diajak berunding, namun ditolak.<sup>135</sup>

Keesokan paginya, Wargo meminta kepada Kepala Polisi untuk melaporkan kekuatan dan persenjataannya supaya diserahkan kepada Direktoratium. Di sini Kepala Polisi melakukan suatu trik supaya dapat keluar dari Dramaga untuk melakukan pengepungan komplotan ini, yaitu meminta izin untuk menelepon ke Markas Polisi di kota untuk mengurus permintaan Wargo. Melalui telepon, di bawah kawalan pasukan hitam Kepala Polisi memanggil dua inspektur untuk segera datang ke Dramaga sambil membawa 'telur' (granat tangan). Sore harinya setelah kedua inspektur tersebut datang, terdengar kabar adanya pertempuran melawan Sekutu di kampung Sindangbarang. Kepala Polisi lantas mengatakan bahwa musuh sudah sangat dekat sehingga lebih baik semua orang meloloskan diri secepat mungkin. Saran tersebut dituruti oleh petinggi Direktoratium untuk meninggalkan tempat itu. Setelah hanya tinggal Kepala Polisi dan kedua inspekturnya saja di tempat itu, mereka langsung tancap gas untuk kembali ke kota. Dalam perjalanan, di desa Caringin mobil mereka mogok dan berpapasan dengan rombongan Direktoratium dan pasukan hitamnya. Dengan alasan bahwa mereka pergi untuk mencari bantuan untuk melawan Sekutu di Sindangbarang, ketiga orang tersebut diizinkan untuk terus, bahkan dipinjami mobil yang baru.<sup>136</sup>

Aksi Direktoratium tersebut nyaris diakui oleh perwakilan Pemerintahan Pusat sebagai pemegang kekuasaan yang sah di daerah Bogor. Hal ini tidak dapat terhindarkan oleh karena jalur komunikasi yang terhambat antara Jakarta dan Bogor akibat layanan transportasi kereta api yang menghubungkan kedua kota

<sup>135</sup> Pemda DT II Bogor, *Op.Cit.*, hlm. 51.

<sup>136</sup> Nasution, *Sekitar ... Jilid II*, hlm. 534–535.

sudah tidak berjalan sejak 6 November 1945.<sup>137</sup> Namun setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, Pemerintah Pusat segera menurunkan perintah untuk menindak tegas aksi tersebut.<sup>138</sup> Penyerbuan dilakukan dengan cepat pada 25 Desember 1945 di bawah pimpinan Kepala Polisi Enoch Danubrata dengan bantuan dari gabungan Resimen Bogor dan laskar-laskar: Batalyon II pimpinan Mayor Toha di Bogor, Batalyon III pimpinan Kapten Haji Dasuki Bakri di Ciampea, Polisi Istimewa pimpinan Muharam Wiranata Kusuma, Laskar Hizbullah pimpinan E. Affandi, Laskar Bogor pimpinan Dadang Sapri, Pasukan Jabang Tutuka pimpinan R.E. Abdullah (Wedana Leuwiliang), dan Lasykar Leuwiliang pimpinan Sholeh Iskandar.<sup>139</sup> Polisi Istimewa datang dengan jumlah personil sebanyak 20 truk bersama-sama pasukan lain yang berjumlah sekitar 5000 orang.<sup>140</sup>

Komplotan Dramaga berhasil dikepung dan ditangkap untuk selanjutnya diserahkan kepada TKR. Sementara itu serangan di Ciampea juga sukses memerdekakan kembali Residen beserta para petinggi dan keluarga masing-masing dari tawanan. Kjai Narija ditangkap bersama seorang radikal asal Banten bernama Tje Mamat yang merupakan buronan RI. Baru diketahui bahwa aksi Direktoratium ini tidak terlepas dari kontribusi dan dukungan Tje Mamat dan pasukannya yaitu Lasykar Gulkut yang lari dari Banten setelah aksi daulatnya di sana mengalami kegagalan.<sup>141</sup> Kedua orang ini langsung diserahkan ke Komandemen I Jawa Barat di Purwakarta untuk diperiksa dan dihukum.<sup>142</sup> Dengan demikian aksi Direktoratium gagal menjalankan kudetanya.

### 3.4 AKHIR MASA BERSIAP DI BOGOR

Setelah huru-hara mereda, Residen dan rombongan segera kembali ke kota untuk memulihkan kedaulatannya. Pada 29 Desember 1945, secara resmi roda pemerintahan dilanjutkan kembali dengan mengeluarkan maklumat agar semua kan-

<sup>137</sup> *Gelora Rakjat*, 8 November 1945.

<sup>138</sup> NEFIS HQ, *Overzicht Onafhankelijkeheids Bewegingen over Java*, 2 Februari 1946.

<sup>139</sup> Iskandar, *Loc.Cit.*, hlm. 12.

<sup>140</sup> Nasution, *Sekitar ... Jilid II*, hlm. 535.

<sup>141</sup> Lihat Sri Handayani, *Op.Cit.* dan Michael C. Williams, "Utang Padi Dibayar Padi, Utang Darah Dibayar Darah", artikel dalam Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan* (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 60–83. Sayangnya kedua karya ini tidak memberikan informasi yang memadai mengenai bagaimana komunikasi antara Kjai Narija dengan Ce Mamat dapat terjalin sehingga mereka dapat berkolaborasi dalam aksi ini.

<sup>142</sup> Pemda DT II Bogor, *Op.Cit.*, hlm. 52.

tor yang ditutup dan pegawai pemerintahan yang mengungsi segera dibuka dan kembali bekerja jika tidak ingin jabatannya dicabut dan dipindahkan pada orang lain.<sup>143</sup> Hingga awal tahun 1946, kegiatan kenegaraan di daerah Bogor berangsur-angsur pulih kembali, khususnya bagian Polisi dan TKR yang ‘hampir kehilangan akal’ setelah selama dua hari menindak tegas komplotan Kjai Narija.<sup>144</sup>

Di saat yang sama, pihak komando tentara Sekutu memperkuat pertahanannya di kantor Polisi. Beberapa tembok dilubangi dan dipasang mitralyur. Di Bank Rakyat, jembatan Cikuduit (Kedunghalang) diadakan penjagaan di mata air Ciburial. Mereka juga membuat pertahanan-pertahanan di Istana, kamp Batalion 14, kamp Kedunghalang, Kantor Pajak, Sekolah Guru dan Gereja Katolik. Di sekeliling Kebun Raya dipasangkan kawat listrik dan digantungkan granat setiap jarak lima meter.<sup>145</sup> Serdadu Gurkha juga semakin intensif melakukan penggeledahan, penggedoran, penembakan terhadap rakyat yang berujung pada pertempuran bahkan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Indonesia. Perbuatan-perbuatan mereka mengundang reaksi protes Residen yang diajukan kepada pimpinan tentara Sekutu di Bogor, dan menuntut supaya:<sup>146</sup>

1. Senjata Polisi yang dijarah oleh serdadu Gurkha bersama kaum Indo dipulangkan kembali.
2. Orang-orang yang diculik dimerdekan.
3. Barang-barang yang dijarah dari rumah-rumah penduduk dikembalikan dan tidak perlu dijaga lagi.
4. Pasukan Gurkha meninggalkan Kebun Raya agar keamanan terjaga.

Protes ini kemudian ditindaklanjuti dengan diadakannya pertemuan Residen Bogor dengan petinggi tentara Inggris untuk membicarakan usaha mengembalikan keamanan pada 14 Januari 1946 di Kantor Pos Bogor. Dalam pertemuan tersebut hadir pula anggota-anggota KNI Keresidenan Bogor, wakil Pemerintah Pusat yaitu Gaos Hardjasoemantri dan wakil TKR.<sup>147</sup> Hasil perundingan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>148</sup>

<sup>143</sup> *Gelora Rakjat*, 17 Januari 1946.

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Antara*, 3 Januari 1946.

<sup>146</sup> *Antara*, 4 Januari 1946.

<sup>147</sup> *Antara*, 15 Januari 1946.

<sup>148</sup> *Antara*, 19 Januari 1946.

1. Polisi Negara bersama-sama dengan Polisi Militer Inggris akan memperketat keamanan di kota dan kabupaten Bogor.
2. Cara kerja pasukan TKR dan Pembantu Polisi dalam usaha mengawasi masuknya pengacau dan penjahat ke wilayah Bogor akan dibicarakan lebih jauh.
3. Pihak RI bersedia mengusahakan supaya perekonomian diselenggarakan lagi dan pelayanan fasilitas umum dibuka kembali.
4. Pimpinan Tentara Serikat Bogor yaitu Brigadir Mellshop menyatakan bahwa pemimpin-pemimpin militer tidak akan mengganggu lalu lintas rakyat RI yang menjalankan pekerjaan yang sah, sekaligus menjamin bahwa pekerjaan Pemerintah RI Keresidenan Bogor dapat berlangsung dengan baik. Sebaliknya Pemerintah RI bersedia untuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada Sekutu.

Dengan dijaminnya kelancaran bagi Pemerintah RI di Bogor oleh Pimpinan Tentara Sekutu menandakan bahwa eksistensi pemerintahan republik telah diakui oleh mereka. Meskipun masih terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak tentara Sekutu yang memancing pertempuran dengan TKR dan laskar-laskar rakyat, pengakuan ini menandakan Pemerintah Keresidenan Bogor telah siap untuk melanjutkan perjuangan revolusi kemerdekaan RI di wilayahnya.

## BAB 4

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirangkum bagaimana Bogor mengalami Masa Bersiapnya. Pemerintahan RI di Keresidenan Bogor berdiri pada 20 Agustus 1945 namun kekuasaan pemerintah militer Jepang yang berada di tangan *Shūchōkan* Hakateda baru secara resmi dipindahkan kepada Residen Ijok Moh. Sirodz pada 1 Oktober 1945. Hal ini menunjukkan kekuasaan atas kabupaten dan kota Bogor mengalami negosiasi perpindahan yang lamban, mengingat usaha yang dilakukan kaum *republikein* untuk meminta pengambilalihan kekuasaan kepada *Shūchōkan* tidak ditanggapi langsung oleh karena perintah mempetahankan *status quo* dari *Saikoshikikan*. Suasana yang dilaporkan selama minggu-minggu terakhir Agustus 1945 di Bogor pada umumnya terkendali, dan para tawanan Jepang yang terdiri dari orang-orang Eropa, Indo dan Cina sudah dilepaskan dari penjara dan kembali ke rumah masing-masing.

Keadaan menjadi panas pada Oktober 1945 ketika dilaporkan sekelompok pemuda berpakaian anggota BKR dan Pelopor melakukan *sweeping* terhadap orang-orang Eropa dan Indo. *Sweeping* ini dilakukan cenderung tanpa pandang bulu terhadap semua orang berkulit putih dengan tuduhan sepihak sebagai kaki tangan NICA. Kekerasan dan penganiayaan yang dialami orang-orang Eropa oleh para pendukung RI (setidaknya dari penampilan fisik dan pakaian yang mereka gunakan) tidak dapat diatasi oleh otoritas keamanan RI setempat, bahkan cenderung dibiarkan sejalan dengan maklumat keadaan perang melawan NICA. Sejauh ini, alasan logis mengapa tindakan-tindakan seperti itu dibiarkan adalah karena lemahnya koordinasi dan ketidaksiapan aparat pemerintah RI untuk mencegah hal-hal tersebut. Selain itu, perbedaan antara kebijakan yang diambil Pusat dan kenyataan yang harus dihadapi Daerah menyebabkan timbulnya pertikaian internal yang mengakibatkan rongrongan terhadap pemerintah RI yang sah tak terhindarkan.

Menjelang akhir Oktober, tentara Sekutu tiba di Bogor dan mengatur beberapa kesepakatan mengenai status keadaan perang (*staat van beleg*) dengan Pe-



merintah RI setempat. Di atas kertas, Residen seolah-olah memegang semua hak autoritas dan mampu menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah Bogor, bahkan keputusannya dijamin akan dihormati dan dipatuhi oleh Sekutu. Akan tetapi, di lapangan terjadi sebaliknya. Serdadu-serdadu Gurkha dan NICA turun ke kampung-kampung lalu menembaki dan menganiaya penduduk sipil, bahkan terlibat dalam beberapa pertempuran dengan anggota BKR, Pelopor dan laskar-laskar bersenjata lainnya. Kondisi 'ganjil' tersebut menyebabkan situasi Bogor menjadi genting dan tidak aman, bahkan Pemerintah menghimbau supaya kaum perempuan, anak-anak dan manula mengungsi dari Bogor demi keselamatan masing-masing. Di bulan November, pertempuran-pertempuran yang terjadi semakin menghebat, apalagi dengan adanya berita pertempuran di Surabaya yang digambarkan begitu heroik hingga memancing semangat para *republikein* untuk mempertahankan keyakinan mereka bahwa orang-orang Gurkha, Inggris dan Belanda benar-benar berniat untuk mengambil kembali Indonesia yang sudah merdeka.

Desember 1945 menjadi bulan paling suram dalam sejarah Bogor setelah kemerdekaan. Sekutu menjadi lebih agresif menggeledah, membakar rumah-rumah, menembaki penduduk sipil dan menjatuhkan bom ke kampung-kampung yang mereka duga sebagai persembunyian orang-orang yang mereka sebut 'ekstrimis'. Istana Bogor jatuh ke pihak Sekutu sekaligus menandai kemunduran pihak RI dari dalam kota akibat tekanan-tekanan Sekutu. Dalam situasi yang seperti ini ketika Residen dan para staf beserta keluarganya mengungsi ke Dramaga, Direktorium beraksi. Pada saat itu sebenarnya pihak RI dapat menumpas aksi tersebut dengan kekuatan bersenjata, namun pilihan ini ditolak oleh Residen untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak perlu. Aksi ini pada akhirnya gagal dan berhasil ditumpas tanpa jatuh korban dengan penyelesaian yang cepat berkat kerjasama TKR, Polisi dan laskar-laskar yang mendukung RI.

Dengan demikian, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Masa Bersiap di wilayah Bogor, khususnya kabupaten dan kotamadya, terjadi sebagai akibat dari kemampuan pemerintah Keresidenan Bogor yang sebenarnya belum memadai untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban wilayahnya sendiri. Hal ini dapat dimaklumi oleh karena usia pemerintahan yang masih sangat muda, bahkan belum memiliki pengalaman yang cukup terutama sebagai pemimpin

untuk bangsanya sendiri. Akan tetapi, keamanan dan ketertiban tersebut terganggu sejak kedatangan tentara Sekutu yang diboncengi opsir-opsir NICA yang hendak memulihkan kekuasaan Hindia Belanda di Tanah Air. Perintah dari Pusat untuk bekerja sama dengan Sekutu sementara tentara Gurkha dan NICA bertindak semena-mena terhadap rakyat menyebabkan sekelompok massa menganggap Residen tidak revolusioner, sehingga mereka memutuskan untuk menggantinya secara sepihak tanpa bisa dicegah oleh aparat keamanan. Dengan berakhirnya aksi ini yang dilanjutkan dengan pemulihan kedudukan Residen, diikuti pengakuan pihak komando tentara Sekutu terhadap pemerintahan RI di Keresidenan Bogor, suasana Bersiap telah berakhir.

Di sisi lain, studi ini dapat dikembangkan lebih jauh dan lebih dalam, misalnya penelitian untuk menjawab kemungkinan Masa Bersiap sebagai salah satu gerakan kolektif untuk merongrong RI yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. Ini merupakan suatu tantangan tersendiri untuk menyelidiki mengapa dan bagaimana gerakan ini muncul ketika sebuah republik baru lahir dan semestinya didukung, mengingat pengumpulan sumber-sumber sejarah yang membutuhkan keahlian khusus oleh karena tingkat kesulitannya yang cukup tinggi. Sebagai salah satu kajian sejarah lokal, studi ini juga sangat penting untuk memahami bagaimana sekelompok massa dapat mengelola suatu manajemen konflik dan mengambil keuntungan sendiri dari huru-hara yang telah diciptakan, yang mungkin memiliki ciri dan karakteristik sama seperti yang terjadi misalnya dalam kerusuhan pada tahun 1965–1966, 1974 bahkan 1998.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. SUMBER ARSIP

Algemeene Secretarie 1942–1945 (koleksi Arsip Nasional RI):

- 114 Algemene dossiers betreffende de binnenlandse ontwikkelingen op politiek gebied, voornamelijk handdend over de invloeden van de republikeinse groeperingen, 1945
- 153 Stukken, verslagen en rapporten over de moordaanslagen en onge-regeldheden in West-Java, met name in Buitenzorg, Bandung, Depok en Batavia; met verslagen over de toestanden in de kampen in die gebieden, 1945 okt–1946
- 1401 Ingekomen brieven van de NEFIS betreffende de politieke bewegingen op Java, 1945–1946
- 1403 Rapporten van Speciale Agenten van Afdeling IV van de NEFIS bevattende berichtgeving over republikeinse troepbewegingen en akties (gestencild), 1946 feb-apr

Memorie van Overgave (koleksi Arsip Nasional RI):

serie 2e Letterie, Mr. P.H.: 8 juni 1933, m.r. 1161/34

### II. SURAT KABAR DAN PUBLIKASI MEDIA

ANTARA, harian, Januari 1946.

GELORA RAKJAT, Bogor, Selasa-Kamis-Sabtu, 1945-1946.

MERDEKA, Jakarta, harian, 1945.

SOEARA ASIA, Surabaya, harian, 1942.

SOEARA MERDEKA, Bandung, harian, 1945.

TJAHAJA, Bandung, harian, 2604-2605.

### III. BUKU DAN ARTIKEL

Abdullah, Taufik. *Sejarah Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978.

Adam Malik. *Mengabdikan Republik jilid II: Angkatan 45*. Jakarta: Gunung Agung, 1978.

- Anderson, Benedict R. O'G. *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944–1946*. Ithaca dan London: Cornell University Press, 1972.
- Benda, Harry J. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942–1945*. Den Haag dan Bandung: W. van Hoeve, 1958.
- Bussemaker, Dr. H.Th. *Bersiap! Opstand in het paradijs: De Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945–1946*. Zutphen: Walburg Press, 2005.
- Cribb, Robert Bridson. *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945–1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni* (terj. Hasan Basari). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah* (terj. Nugroho Notosusanto). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1985.
- Hartojo D. Kadjat, “Mentalitas Revolusi di Indonesia”, t.p., 1994.
- Iskandar, Mohammad, “MASA BERSIAP DI KABUPATEN BOGOR (Bogor Sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI),” makalah pada Seminar Sehari tentang Kajian Lahirnya Bogor, Sindangbarang (Bogor: 11 Juni 2008).
- Kahin, Audrey R. *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan* (terj. Satyagraha Hoerip). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- Kartahadimaja, Ramadhan. A.E. *Kawilarang untuk Sang Merah Putih: pengalaman 1942–1961*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Kartodirdjo, Sartono. “Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektivisme Struktural.” *Prisma* no. 8 (1981), hlm. 3–13.
- Lucas, Anton E. *ONE SOUL ONE STRUGGLE: Peristiwa Tiga Daerah dalam Revolusi Indonesia*. Yogyakarta: Resist Book, 2004.
- Muhamin, Yahya A. *Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia 1945 – 1946*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.
- Nasution, A.H. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 1: Proklamasi*. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit ANGKASA, 1977.

- Nasution, A.H. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 2: Diplomasi atau Bertempur*. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit ANGKASA, 1977.
- Notosusanto, Nugroho. *Tentara PETA pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1979.
- Onghokham. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1998.
- Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. *Sejarah Perjuangan di Kabupaten DT II Bogor 1942–1949*. Bogor: 1986.
- Poesponegoro, Marwati Djoenod dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia jilid IV*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Purwaningsih, Sri Handajani. *Pergolakan Sosial-Politik di Serang pada tahun 1945: Kasus Gerakan Aksi Daulat Ce Mamat*, skripsi sarjana (Jakarta, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1984).
- Reid, Anthony J.S. *Revolusi Nasional Indonesia (terj. Pericles G. Katoppo)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Smail, John. *Bandung in the early revolution, 1945-1946; a study in the social history of the Indonesian revolution*. Ithaca, New York: Cornell University Library, 1964.
- Sosromihardjo, Soedjito. *Perubahan Struktur Masyarakat di Djawa: Suatu Analisa*. Jogjakarta: Penerbit Karya, 1968.
- Suyatno. “Masyarakat Daerah dalam Revolusi: Aspek Revolusi Sosial dalam Revolusi Nasional “, *Prisma* no. 8, 1984.
- Vlekke, Bernard H.M. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Zuhdi, Susanto. *Bogor-Shū pada Masa Pendudukan Jepang: 1942 – 1945*, skripsi sarjana (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1979).

**LAMPIRAN 1**Administratieve indeeling van de residentie .BUITENZORG.-

Residentie	Regenschappen	Districten	Onderdistricten Roode letters geven aan onderdistricten, waar de Wedana's het bestuur voeren.	Aanmerkingen
Buitenzorg (Buitenzorg)	Buitenzorg (Buitenzorg)	Buitenzorg (Buitenzorg)	1.Buitenzorg 2.Semplak 3.Tjiomas 4.Kedoenghalang	
		Paroeng (Paroeng)	5.Paroeng 6.Depok	Wordt uit bezui- nigingsoogpunt tyde- lyk bestuurd door den Wedana van Paroeng.
		Tjibinong (Tjibinong)	7. Tjibinong 8.Tjiteureup	Wordt uit bezui- nigingsoogpunt tyde- lyk bestuurd door den Wedana van Tjibinong.
		Tjibaroesa (Tjibaroesa)	9.Tjibaroesa 10.Lemahabang 11.Tjileungsi 12.Djonggol	Wordt uit bezui- nigingsoogpunt tyde- lyk bestuurd door den Wedana van Tjibaroesa.-
		Djasinga (Djasinga)	13.Djasinga 14.Paroengpandjang.	
		Leuwiliang (Leuwiliang)	15.Leuwiliang 16.Roempin	
		Tjiawi (Tjiawi)	17.Tjiawi 18.Tjisaroea 19.Tjidjeroek	Wordt uit bezui- nigingsoogpunt tyde- lyk bestuurd door den Wedana van Tjiawi.-

Buitenzorg	Soekaboemi (Soekaboemi)	Soekaboemi (Soekaboemi)	20. Soekaboemi 21. Soekaradja 22. Baros 23. Tjisaät	
		Tjibadak (Tjibadak)	24. <b>Tjibadak</b> 25. <b>Nagrak</b> 26. Tjikembar	Wordt uit bezuinigingsoogpunt tydelijk bestuurd door den Wedana van Tjibadak.-
		Tjitjoereog (Tjitjoereog)	27. <b>Tjitjoereog</b> 28. Paroengkoeda. 29. Benda.	Wordt uit bezuinigingsoogpunt tydelijk bestuurd door den Wedana van Tjitjoereog
Buitenzorg	Soekaboemi (Soekaboemi)	Tjitjoreog (Tjitjoereog)	30. Klapanoenggal	
		Palaboean (Plaboeanratoe)	31. <b>Plaboean</b> 32. Tjikidang 33. Waroengkiara. 34. Tjisolak	Wordt uit bezuinigingsoogpunt tydelijk bestuurd door den Wedana van Plaboean. <i>niel overijlg, met bestuur belast Mন্ত্রী Politie Plaboean.-</i>
		Djampangtengah (Bodjonglopang)	35. <b>Djampangtengah</b> 36. Njalindoeng 37. Sagaranten	Wordt uit bezuinigingsoogpunt tydelijk bestuurd door den Wedana van Djampangtengah.-
		Djampangkoelon (Djampangkoelon)	38. <b>Djampangkoelon</b> 39. Lengkong 40. Tjiomas. 41. Tjiratjap	Wordt uit bezuinigingsoogpunt tydelijk bestuurd door den Wedana van Djampangkoelon.-
	Tjiandjoer (Tjiandjoer)	Tjiandjoer (Tjiandjoer)	42. Tjiandjoer 43. Sabandar	
		Tjirandjang (Tjirandjang)	44. <b>Tjirandjang</b> 45. Bodjongpitjoeng	Wordt uit bezuinigingsoogpunt tyde-

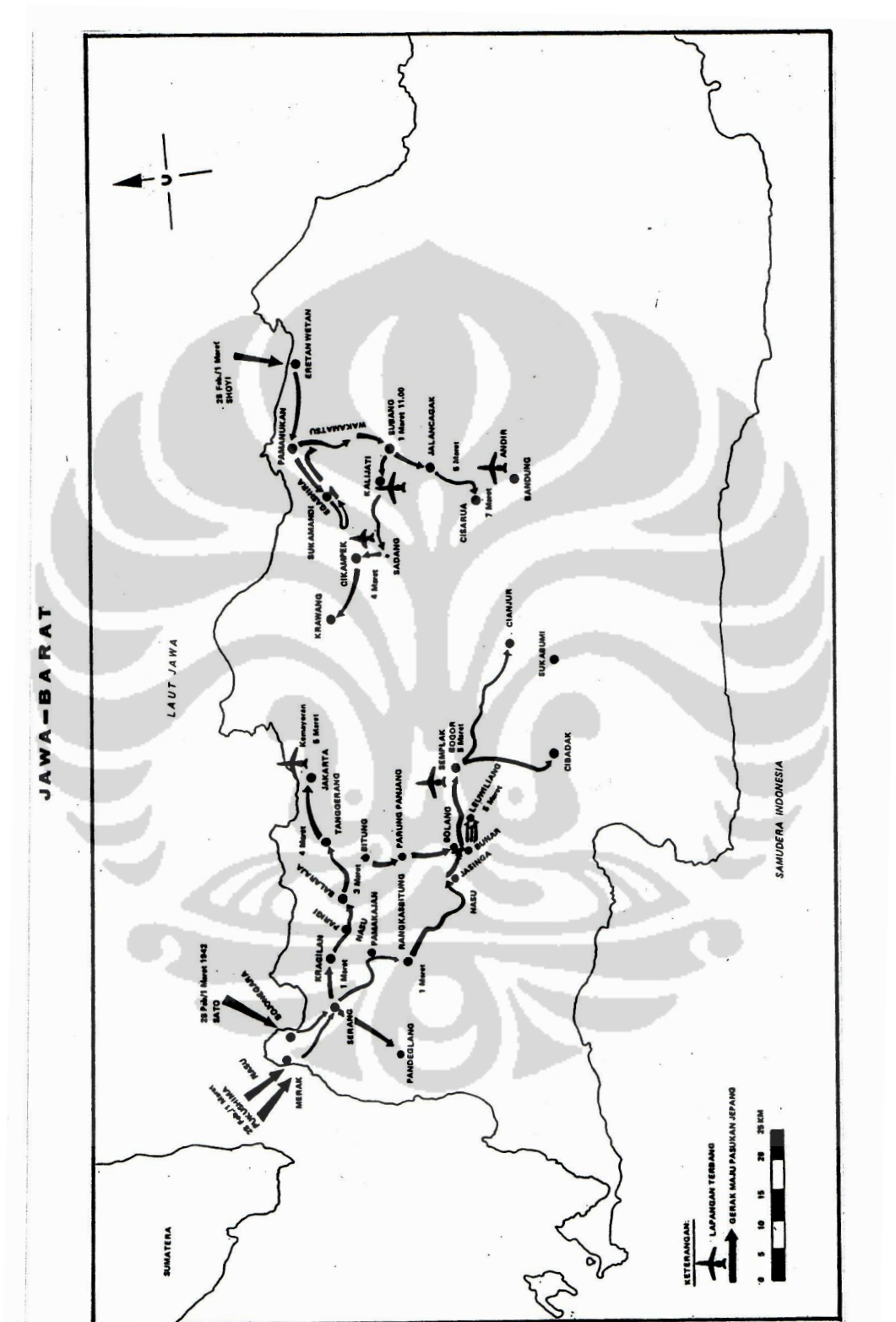
				lyk bestuurd door den Wedana van Tjirandjang.
		Tjikalongkoelon (Tjikalongkoelon)	46.Tjikalongkoelon 47.Mande	Bij dzz.schrijven van 5 September jl.No. 991/Geheim werd voorgesteld dit district op te heffen en het onderdistrict Tjikalongkoelon by het district Patjet en het onderdistrict Mande by het district Tjirandjang te voegen.-
		Patjet (Patjet)	48.Patjet 49.Tjoegenang	Wordt uit bezuinigingsoogpunt tydelijk bestuurd door den Wedana van Patjet.-
		Tjibeber (Tjibeber)	50.Tjibeber 51.Tjilakoe 52.Waroengkondang	Wordt uit bezuinigingsoogpunt tydelijk bestuurd door den Wedana van Tjibeber.-
		Soekanagara (Soekanagara)	53.Soekanagara 54.Tjempaka	Wordt uit bezuinigingsoogpunt tydelijk bestuurd door den Wedana van
		Soekanagara (Soekanagara)	55.Pagelaran 56.Kadoepandak	Soekanagara.-
		Sindangbarang (Sindangbarang)	57.Leles <i>Sindangbarang</i> 58.Tjibinong 59.Tjidaoen	Wordt uit bezuinigingsoogpunt tydelijk bestuurd door den Wedana van Sindangbarang.

sumber : Hoofdstuk I Indeeling en Bestuur, Bijlage I, pagina 64 (MvO).



## LAMPIRAN 2

## Peta Gerak Maju Pasukan Jepang di Jawa Barat



sumber : AH. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 1: Proklamasi*. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit ANGKASA, 1977. hlm. 85.

### LAMPIRAN 3

#### DAFTAR NAMA PEJABAT DI BOGOR-SHŪ

Residen Bogor      Mar – Sept '42      Raden Adipati Aria Soerijadjanegara  
(Pembantu Gubernur)

Bogor *Shūchōkan*      Sept '42 – Nov '42      Sonoyama, Kolonel  
Nov '42 – Mar '43      Tamate Koichi  
Mar '43 – Agst '44      Sawakimoto  
Agst '44 – menyerah      Ichi Eisaku (Hakateda)

Bogor Fuku- *Shūchōkan*      Des '44 – Agst '45      K.H. Ahmad Sanoesi

Bogor *Shīchō*      Sept '42 – Agst '45      dr. Mr. R. Ngabei Soebroto

Bogor *Kenchō*      Sept '42 – Agst '45      R.A.A. Soerijadjanegara

Sukabumi *Shīchō*      Feb '42      R. Ranga Adiwikarta  
Feb '42 – Nov '44      R. Abas Wilaga Soemantri  
Nov '44 – Agst '45      Mr. Raden Samsuoddin

Sukabumi *Kenchō*      1942 – 1943      R. Ranga Tirta Soejatna  
1943 – 1945      R. Ranga Adiwikarta

Cianjur *Kenchō*      1942 – 1943      R.A.A. Abas Soeria Nataatmadja  
1943 – 1944      R. Ranga Adiwikarta  
1944      Mohammad Sirodz

sumber : Lampiran B dari Susanto Zuhdi, *Bogor-Shū pada Masa Pendudukan Jepang: 1942 – 1945*, skripsi sarjana (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1979, dengan perubahan seperlunya.

## LAMPIRAN 4

### Summary of Dates

#### October 1945

12th (night 11–12th)	General arrest of European inhabitants.
12th – 20th	Imprisonment on Pledang (Prison), men and male children; guarding by B.K.R.
19th	Transfer of appr. 100 men from Pledang Prison to Police Station.
20th, ca. 5 O'clock a.m	Secret abduction of 6 Dutchmen from Prison and two from the Police Station.
20th (in the morning)	Transfer of appr. 50 men to the small Prison on Pledang.
20th appr. 11 o'clock	Inspection of Prison by English
20th – 22nd	All Indonesians out of prison, also "hoekoemans". Direction by Camp Committe.
21rst	On order of the Camp Committee the 100 men in the Police Station are brought back to Prison.
22nd; 12 – 2 o'clock	Transfer of all Europeans from Prison, small prison, and Vincentius building to barracks of 14th Bat. on Pabaton.
22nd	Stay on Pabaton. Appr. 1200 men directed by Camp Committe.

sumber : *Annex III, Verslag van de Ongeregeldheden en de Wederwaardigheden van de door de Indonesiërs Geïnterneerde Europese Mannelijke Ingezetenen te Buitenzorg en Omgeving van begin October tot 22 October 1945*, Buitenzorg, 27 October 1945